



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**

**NOMOR : 47 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 11 AGUSTUS 2018**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



## BUPATI MALUKU TENGAH

### PROVINSI MALUKU

#### PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

RAH

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106);

RA H

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 511);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).

RAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA - OPD adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Organsasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga satuan biaya masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019  
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai acuan bagi OPD untuk menyusun RKA - OPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2019.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA - OPD Tahun Anggaran 2019.

RAH

- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai :
  - a. Batas tertinggi; atau
  - b. Estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektifitas, dan efisiensi, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya lainnya dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil / daerah perbatasan / pulau terluar.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2019.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2020.

RAH

KETENTUAN PENUTUP

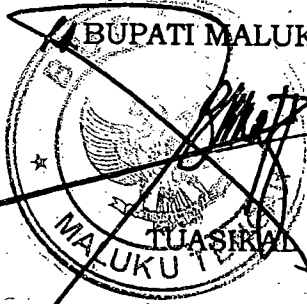
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

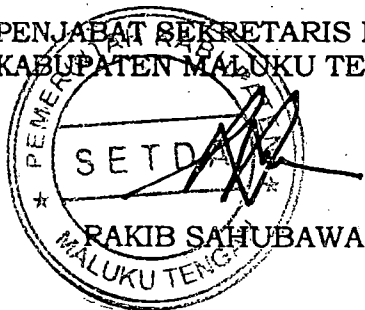
Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 11 Agustus 2018

BUPATI MALUKU TENGAH, *bf*



Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 11 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *bf*



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 407

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR : 47 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2018  
 TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
1.1	Pejabat Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	950,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1,070,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1,170,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	1,310,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1,600,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,900,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	2,250,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	2,600,000
1.2	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	600,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	710,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	760,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OB	910,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1,020,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,140,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,420,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,700,000
1.3	Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	600,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	710,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	760,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	910,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1,020,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,140,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,420,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,700,000
1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	600,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	710,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	760,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	910,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1,020,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,140,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,420,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,700,000
1.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	470,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	560,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	650,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	760,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	870,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	980,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,240,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,500,000
1.6	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	470,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	560,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	650,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	760,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	870,000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	980,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OE	1,240,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,500,000
1.7.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	470,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	560,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	650,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	760,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	870,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	980,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,240,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,500,000
1.8.	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	380,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	450,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	520,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OB	590,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	660,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	730,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	800,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	870,000
2	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
2.1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	480,000
2.2.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Per Paket	480,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	650,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	820,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	1,070,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1,320,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,580,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	OP	1,920,000
2.3.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Per Paket	460,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	560,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	620,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	840,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1,070,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,300,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	OP	1,610,000
2.4.	Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	Per Paket	350,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	350,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 juta	Per Paket	350,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	450,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	550,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OP	650,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	750,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	850,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,070,000
3	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA</b>		
	<b>PEMERINTAH</b>		
3.1	Kepala ULP	OB	1,750,000
3.2	Sekretaris ULP	OB	1,500,000
3.3	Staf ULP	OB	750,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</b>		
4		OB	1,750,000
4.1	Ketua LPSE	OB	1,500,000
4.2	Sekretaris LPSE	OB	1,250,000
4.3	Koordinator dan Verifikator	OB	1,000,000
4.4	Tenaga IT	OB	750,000
4.5	Staf LPSE		
5	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>	OB	220,000
5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa		
5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa	OP	220,000
e.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	320,000
b.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	420,000
c.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	570,000
d.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	710,000
e.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	860,000
f.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,060,000
g.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.10 miliar		
6	<b>HONORARIUM STAF PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN</b>		
6.1.	Direksi	OB	320,000
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	420,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	520,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	620,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	720,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	820,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	920,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,020,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar		
6.2.	Pengawas Lapangan		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	270,000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	340,000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	410,000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	480,000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	550,000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	620,000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	690,000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	760,000
7	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)</b>		
7.1	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Kepala SKPD		
a.	Pengarah	OB	400,000
b.	Penanggungjawab	OB	300,000
c.	Koordinator	OB	250,000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000
e.	Anggota/Petugas	OB	150,000
8	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
8.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	500,000
8.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	350,000
9	<b>HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
9.1	Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60,000
9.2	Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50,000
9.3	Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40,000
9.4	Peneliti/Perekayasa Pratama	OJ	35,000
10	<b>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
10.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	28,000
10.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	320,000
10.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	200,000
10.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	750,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	10.5 Petugas Survey	Orang/ Responden	8,000
	10.6 Pembantu Lapangan	OH	30,000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
	11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas :		
	a. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	800,000
	b. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	700,000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	500,000
	11.2 Honorarium Moderator	OJ	350,000
	11.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	300,000
<b>12</b>	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/ KEGIATAN SEJENIS</b>		
	12.1 Penanggung Jawab	OK	350,000
	12.2 Ketua/Wakil Ketua	OK	300,000
	12.3 Sekretaris	OK	250,000
	12.4 Anggota	OK	200,000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (HONDA)</b>		
	13.1 SLTA	OB	1,400,000
	13.2 Sarjana Muda/Diploma	OB	1,600,000
	13.3 Sarjana (S1)	OB	1,800,000
	13.4 Sarjana (S2)	OB	2,000,000
<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b>		
	14.1 Biaya Operasional Penyuluh	OB	350,000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>		
	15.1 Rohaniawan Doa	OK	300,000
	15.2 Rohaniawan Sumpah	OK	300,000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TENAGA IT, OPERATOR KOMPUTER, TENAGA ADMINISTRASI, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS DAMKAR, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>		
	16.1 Tenaga IT	OB	1,800,000
	16.2 Operator Komputer / Aplikasi	OB	1,500,000
	16.3 Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya	OB	1,400,000
	16.4 Satpam dan Pengemudi	OB	1,400,000
	16.5 Petugas Pemadam Kebakaran	OB	1,400,000
	16.6 Petugas Kebersihan (Cleaning Service) dan Pramubakti	OB	1,300,000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Pengarah	OB	500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	450,000
	c. Koordinator/Ketua	OB	400,000
	d. Wakil Ketua	OB	350,000
	e. Sekretaris	OB	300,000
	f. Anggota	OB	250,000
	17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	300,000
	b. Anggota	OB	250,000
<b>18</b>	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERDA TENTANG APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	18.1 Pembina		
	18.2 Wakil Pembina	OK	9,000,000
	18.3 Pengarah	OK	8,000,000
	18.4 Koordinator I	OK	7,500,000
	18.5 Koordinator II	OK	7,500,000
	18.6 Ketua	OK	7,000,000
	18.7 Sekretaris	OK	6,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	18.8 Anggota	OK	6,250,000
	18.9 Staf Gol. II	OK	6,000,000
	18.10 Staf Gol. II	OK	5,500,000
19	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	19.1 a. Pembina	OK	9,000,000
	19.2 b. Wakil Pembina	OK	8,500,000
	19.3 c. Pengarah	OK	8,000,000
	19.4 d. Koordinator I	OK	7,500,000
	19.5 e. Koordinator II	OK	7,500,000
	19.6 a. Ketua	OK	7,000,000
	19.7 f. Sekretaris	OK	6,500,000
	19.8 g. Anggota	OK	6,250,000
	19.9 h. Staf Gol. III	OK	6,000,000
	19.10 i. Staf Gol. II	OK	5,500,000
20	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	20.1 Ketua	OK	5,000,000
	20.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	20.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	20.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	20.5 Anggota	OK	3,000,000
21	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	21.1 Ketua	OK	5,000,000
	21.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	21.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	21.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	21.5 Anggota	OK	3,000,000
22	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD)</b>		
	22.1 Pembina	OK	5,000,000
	22.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
	22.3 Ketua	OK	4,500,000
	22.4 Wakil Ketua	OK	4,250,000
	22.5 Sekretaris	OK	4,000,000
	22.6 Wakil Sekretaris	OK	3,750,000
	22.7 Anggota	OK	3,000,000
	22.8 Staf Gol. III	OK	3,000,000
	22.9 Staf Gol. II	OK	2,750,000
23	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	23.1 Pembina	OK	9,000,000
	23.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
	23.3 Pengarah	OK	8,000,000
	23.4 Koordinator I	OK	7,500,000
	23.5 Koordinator II	OK	7,500,000
	23.6 Ketua	OK	7,000,000
	23.7 Sekretaris	OK	6,500,000
	23.8 Anggota	OK	6,250,000
	23.9 Staf Gol. III	OK	6,000,000
	23.10 Staf Gol. II	OK	5,500,000
24	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	24.1 Pembina	OK	9,000,000
	24.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
	24.3 Pengarah	OK	8,000,000
	24.4 Koordinator I	OK	7,500,000
	24.5 Koordinator II	OK	7,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
		(3)	(4)
	24.6 Ketua	OK	7,000,000
	24.7 Sekretaris	OK	6,500,000
	24.8 Anggota	OK	6,250,000
	24.9 Staf Gol. III	OK	6,000,000
	24.10 Staf Gol. II	OK	5,500,000
25	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	25.1 Ketua	OK	5,000,000
	25.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	25.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	25.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	25.5 Anggota	OK	3,000,000
26	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	26.1 Ketua	OK	5,000,000
	26.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	26.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	26.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	26.5 Anggota	OK	3,000,000
27	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN OPD (DPA - OPD)</b>		
	27.1 Pembina	OK	5,000,000
	27.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
	27.3 Ketua	OK	4,500,000
	27.4 Wakil Ketua	OK	4,250,000
	27.5 Sekretaris	OK	4,000,000
	27.6 Wakil Sekretaris	OK	3,750,000
	27.7 Anggota	OK	3,000,000
	27.8 Staf Gol. III	OK	3,000,000
	27.9 Staf Gol. II	OK	2,750,000
28	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	28.1 Pembina	OK	9,000,000
	28.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
	28.3 Pengarah	OK	8,000,000
	28.4 Koordinator I	OK	7,500,000
	28.5 Koordinator II	OK	7,500,000
	28.6 Koordinator III	OK	7,500,000
	28.7 Ketua	OK	7,000,000
	28.8 Sekretaris	OK	6,500,000
	28.9 Anggota	OK	6,250,000
	28.10 Staf Gol. III	OK	6,000,000
	28.11 Staf Gol. II	OK	5,500,000
29	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	29.1 Ketua	OK	5,000,000
	29.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	29.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	29.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	29.5 Anggota	OK	3,000,000
30	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	30.1 Pembina	OK	9,000,000
	30.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
	30.3 Pengarah	OK	8,000,000
	30.4 Koordinator I	OK	7,500,000
	30.5 Koordinator II	OK	7,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
		(3)	(4)
	30.6 Koordinator III	OK	7,500,000
	30.7 Ketua	OK	7,000,000
	30.8 Sekretaris	OK	6,500,000
	30.9 Anggota	OK	6,250,000
	30.10 Staf Gol. III	OK	6,000,000
	30.11 Staf Gol. II	OK	5,500,000
31	<b>KONFERANSI TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	31.1 Ketua	OK	5,000,000
	31.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
	31.3 Sekretaris	OK	4,500,000
	31.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
	31.5 Anggota	OK	3,000,000
32	<b>KONFERANSI TIM TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AKHIR DAN LAPORAN ARUS KAS KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	32.1 Pembina	OK	5,000,000
	32.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
	32.3 Pengarah	OK	4,500,000
	32.4 Koordinator I	OK	4,250,000
	32.5 Koordinator II	OK	4,250,000
	32.6 Koordinator III	OK	4,250,000
	32.7 Ketua	OK	4,000,000
	32.8 Sekretaris	OK	3,750,000
	32.9 Anggota	OK	3,000,000
	32.10 Staf Gol. III	OK	3,000,000
	32.11 Staf Gol. II	OK	2,750,000
33	<b>KONFERANSI TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTER APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	33.1 Pembina	OK	7,000,000
	33.2 Wakil Pembina	OK	6,500,000
	33.3 Pengarah	OK	6,000,000
	33.4 Koordinator I	OK	5,500,000
	33.5 Koordinator II	OK	5,500,000
	33.6 Koordinator III	OK	5,500,000
	33.7 Ketua	OK	5,000,000
	33.8 Sekretaris	OK	4,750,000
	33.9 Anggota	OK	4,500,000
	33.10 Staf Gol. III	OK	4,500,000
	33.11 Staf Gol. II	OK	4,250,000
34	<b>KONFERANSI TIM PENYELESAIAN ADMINISTRASI GAJI KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	34.1 Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	34.2 Ketua	OB	1,250,000
	34.3 Sekretaris	OB	1,100,000
	34.4 Anggota	OB	1,000,000
35	<b>KONFERANSI TIM PENYELESAIAN SPT TAHUNAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	35.1 Pembina	OB	2,000,000
	35.2 Koordinator	OB	1,750,000
	35.3 Ketua	OB	1,500,000
	35.4 Sekretaris	OB	1,300,000
	35.5 Anggota	OB	1,200,000
36	<b>KONFERANSI TIM REKONELIASI DAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	36.1 Pengarah	OB	1,500,000
	36.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
	36.3 Ketua	OB	1,250,000
	36.4 Wakil Ketua	OB	1,000,000
	36.5 Sekretaris	OB	900,000
	36.6 Anggota	OB	750,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
37	<b>HONORARIUM TIM SISMIOP PBB-P2 DAN TENAGA OUTSOURCING</b>		
	37.1 Tim Sismiop PBB - P2		
	a. Penanggungjawab	OK	2,500,000
	b. Ketua	OK	2,250,000
	c. Wakil Ketua	OK	2,225,000
	d. Sekretaris	OK	2,000,000
	e. Wakil Sekretaris	OK	1,750,000
	f. Administrasi SISMIOP	OK	1,500,000
	g. Anggota	OK	1,000,000
	37.2 Tenaga Outsourcing (Masa Kerja 5 Tahun Keatas)		
	a. SLTA	OK	1,350,000
	b. Sarjana Muda/Diploma	OK	1,500,000
	c. Sarjana (S1)	OK	1,600,000
	d. Sarjana (S2)	OK	1,800,000
38	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELESAIAN DAN PENYIAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</b>		
	38.1 Penanggungjawab	OB	700,000
	38.2 PPTK	OB	600,000
	38.3 Ketua	OB	350,000
	38.4 Wakil Ketua	OB	300,000
	38.5 Sekretaris	OB	250,000
	38.6 Anggota	OB	200,000
39	<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SATGAS SIMDA) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	39.1 Penanggungjawab	OB	3,250,000
	39.2 Koodinator	OB	3,000,000
	39.3 Ketua	OB	2,750,000
	39.4 Wakil Ketua	OB	2,500,000
	39.5 Sekretaris	OB	2,350,000
	39.6 Admin/Pengendali Teknis	OB	2,250,000
	39.7 Anggota	OB	2,000,000
40	<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA APLIKASI SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SATGAS BIKD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	40.1 Pembina	OB	2,500,000
	40.2 Wakil Pembina	OB	2,350,000
	40.3 Koordinator	OB	2,250,000
	40.4 Wakil Koordinator	OB	2,200,000
	40.5 Ketua	OB	2,150,000
	40.6 Wakil Ketua	OB	2,000,000
	40.7 Sekretaris	OB	1,750,000
	40.8 Anggota	OB	1,600,000
41	<b>HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN NEGARA (TPKDN) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	41.1 Penasihat	OB	1,700,000
	41.2 Ketua	OB	1,650,000
	41.3 Wakil Ketua	OB	1,600,000
	41.4 Sekretaris	OB	1,550,000
	41.5 Anggota	OB	1,050,000
42	<b>HONORARIUM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	42.1 Ketua	OB	1,500,000
	42.2 Sekretaris	OB	1,500,000
	42.3 Anggota	OB	1,500,000
43	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	43.1 Pengarah	OB	3,000,000
	43.2 Penanggungjawab	OB	2,750,000
	43.3 Koordinator/Ketua	OB	2,500,000

RAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
43.4	Wakil Ketua	OB	2,250,000
43.5	Sekretaris	OB	2,000,000
43.6	Anggota	OB	1,500,000
44	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUH ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
44.1	Pengarah	OB	3,000,000
44.2	Penanggungjawab	OB	2,750,000
44.3	Koordinator/Ketua	OB	2,500,000
44.4	Wakil Ketua	OB	2,250,000
44.5	Sekretaris	OB	2,000,000
44.6	Anggota	OB	1,500,000
45	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
45.1	Pengarah	OB	1,500,000
45.2	Penanggungjawab	OB	1,400,000
45.3	Koordinator/Ketua	OB	1,300,000
45.4	Wakil Ketua	OB	1,200,000
45.5	Sekretaris	OB	1,000,000
45.6	Anggota	OB	750,000
46	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JASA KONSULTANSI</b>		
46.1	Pengarah	OB	1,500,000
46.2	Penanggungjawab	OB	1,400,000
46.3	Koordinator/Ketua	OB	1,300,000
46.4	Wakil Ketua	OB	1,200,000
46.5	Sekretaris	OB	1,000,000
46.6	Anggota	OB	750,000
47	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI RENSTRA SKPD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
47.1	Penanggungjawab	OB	350,000
47.2	Ketua	OB	300,000
47.3	Sekretaris	OB	250,000
47.4	Anggota	OB	200,000
48	<b>HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
48.1	Penanggungjawab/Ketua	OJ	75,000
48.2	Anggota	OJ	50,000
49	<b>HONORARIUM TIM PEMUTAHIRAN DATA KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
49.1	Pengarah	OB	450,000
49.2	Penanggungjawab	OB	350,000
49.3	Ketua	OB	300,000
49.4	Sekretaris	OB	250,000
49.5	Anggota	OB	200,000
50	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
50.1	Penanggungjawab	OJ	50,000
50.2	Ketua	OJ	35,000
50.3	Anggota	OJ	35,000
51	<b>HONORARIUM TIM REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD DAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
51.1	Penanggungjawab	OJ	50,000
51.2	Ketua	OJ	35,000
51.3	Anggota	OJ	35,000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
		(3)	(4)
52	<b>HONORARIUM TIM POKJA FASILITASI SPIP DAN KAPABILITAS APIP</b>		
	52.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	52.2 Ketua	OB	300,000
	52.3 Sekretaris	OB	250,000
	52.4 Anggota	OB	200,000
53	<b>HONORARIUM TIM REVIUW PENYERAPAN ANGGARAN PBJ DAN ANGGARAN ADD</b>		
	53.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	53.2 Ketua	OB	300,000
	53.3 Anggota	OB	200,000
54	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI REFORMA BIROKRASI DAN RAD</b>		
	54.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	54.2 Ketua	OB	300,000
	54.3 Anggota	OB	200,000
55	<b>HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL</b>		
	55.1 Penanggungjawab	OJ	50,000
	55.2 Ketua	OJ	35,000
	55.3 Anggota	OJ	35,000
56	<b>HONORARIUM TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN APARATUR KECAMATAN DAN NEGERI</b>		
	56.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	56.2 Ketua	OB	300,000
	56.3 Sekretaris	OB	200,000
	56.4 Anggota	OB	200,000
57	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)</b>		
	57.1 Pengarah	OB	450,000
	57.2 Penanggungjawab	OB	350,000
	57.3 Ketua	OB	300,000
	57.4 Wakil Ketua	OB	250,000
	57.5 Sekretaris	OB	200,000
	57.6 Anggota	OB	200,000
58	<b>HONORARIUM TIM PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGERA (LHKFN)</b>		
	58.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	58.2 Ketua	OB	300,000
	58.3 Anggota	OB	200,000
59	<b>HONORARIUM TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN (TLHTP)</b>		
	59.1 Penanggungjawab	OB	350,000
	59.2 Ketua	OB	300,000
	59.3 Sekretaris	OB	200,000
	59.4 Anggota	OB	200,000
60	<b>HONORARIUM TIM PENYELENGGARAAN MUGREMBANG RKPD</b>		
	60.1 Panitia Pelaksana Muarembang	OB	150,000
	60.2 Panitia Pelaksana Forum Bersama SKPD	OB	150,000
61	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN KEBLJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)</b>	OK	2,500,000
62	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN KEBLJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUAP)</b>	OK	2,500,000
63	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PENETAPAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)</b>	OK	2,500,000
64	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PENETAPAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN</b>	OK	2,500,000
65	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RKA SKPD</b>		
	65.1 Koordinator	OB	500,000
	65.2 Ketua	OB	400,000
	65.3 Anggota	OB	300,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
<b>65</b>	<b>HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PROGRAM TABAOS</b>		
65.1	Pengarah	OB	500,000
65.2	Penanggungjawab	OB	400,000
65.3	Koordinator/Ketua	OB	350,000
65.4	Wakil Ketua	OB	300,000
65.5	Sekretaris	OB	250,000
65.6	Anggota	OB	200,000
<b>67</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)</b>		
67.1	Pengarah/Pembina	OK	4,000,000
67.2	Ketua	OK	3,500,000
67.3	Wakil Ketua	OK	3,250,000
67.4	Sekretaris	OK	3,000,000
67.5	Wakil Sekretaris	OK	2,750,000
67.6	Anggota	OK	2,500,000
<b>68</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN SEKRETARIAT TPID KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
68.1	Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)		
a.	Ketua	OB	1,500,000
b.	Ketua Harian	OB	1,250,000
c.	Wakil Ketua	OB	1,100,000
d.	Sekretaris	OB	750,000
e.	Anggota	OB	500,000
68.2	Honorarium Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)		
c.	Ketua	OB	750,000
d.	Sekretaris	OB	500,000
e.	Anggota	OB	350,000
<b>69</b>	<b>HONORARIUM FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH (FPED)</b>		
69.1	Pengarah	OB	1,500,000
69.2	Penanggungjawab	OB	1,250,000
69.3	Koordinator/Ketua	OB	1,100,000
69.4	Wakil Ketua	OB	1,000,000
69.5	Sekretaris	OB	750,000
69.6	Anggota	OB	500,000
<b>70</b>	<b>HONORARIUM KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)</b>		
70.1	Tenaga Ahli Manajemen	OB	1,500,000
70.2	Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)	OB	1,500,000
<b>71</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN</b>		
71.1	Pengarah	OB	1,500,000
71.2	Penanggungjawab	OB	1,400,000
71.3	Koordinator/Ketua	OB	1,300,000
71.4	Wakil Ketua	OB	1,200,000
71.5	Sekretaris	OB	1,000,000
71.6	Anggota	OB	750,000
<b>72</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN</b>		
72.1	Pengarah	OB	1,750,000
72.2	Penanggungjawab	OB	1,650,000
72.3	Koordinator/Ketua	OB	1,550,000
72.4	Wakil Ketua	OB	1,450,000
72.5	Sekretaris	OB	1,250,000
72.6	Anggota	OB	1,000,000
<b>73</b>	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>		
73.1	Pengarah	OB	1,750,000
73.2	Penanggungjawab	OB	1,650,000
73.3	Koordinator/Ketua	OB	1,550,000
73.4	Wakil Ketua	OB	1,450,000
73.5	Sekretaris	OB	1,250,000
73.6	Anggota	OB	1,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
74	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN</b>		
74.1	Pengarah	OB	1,750,000
74.2	Penanggungjawab	OB	1,650,000
74.3	Koordinator/Ketua	OB	1,550,000
74.4	Wakil Ketua	OB	1,450,000
74.5	Sekretaris	OB	1,250,000
74.6	Anggota	OB	1,000,000
75	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>		
75.1	Pengarah	OB	1,750,000
75.2	Penanggungjawab	OB	1,650,000
75.3	Koordinator/Ketua	OB	1,550,000
75.4	Wakil Ketua	OB	1,450,000
75.5	Sekretaris	OB	1,250,000
75.6	Anggota	OB	1,000,000
76	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK</b>		
76.1	Pengarah	OB	1,750,000
76.2	Penanggungjawab	OB	1,650,000
76.3	Koordinator/Ketua	OB	1,550,000
76.4	Wakil Ketua	OB	1,450,000
76.5	Sekretaris	OB	1,250,000
76.6	Anggota	OB	1,000,000
77	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>		
77.1	Pengarah	OP	9,000,000
77.2	Pembina	OP	8,500,000
77.3	Koordinator/Ketua	OP	8,000,000
77.4	Sekretaris	OP	7,500,000
77.5	Anggota	OP	7,000,000
78	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>		
78.1	Pengarah	OP	9,000,000
78.2	Pembina	OP	8,500,000
78.3	Koordinator/Ketua	OP	8,000,000
78.4	Sekretaris	OP	7,500,000
78.5	Anggota	OP	7,000,000
79	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
79.1	Pengarah	OB	1,500,000
79.2	Penanggungjawab	OB	1,400,000
79.3	Koordinator/Ketua	OB	1,250,000
79.4	Wakil Ketua	OB	1,100,000
79.5	Sekretaris	OB	1,000,000
79.6	Anggota	OB	750,000
80	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN LINGKUP DAERAH LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH</b>		
80.1	Pengarah	OB	1,500,000
80.2	Penanggungjawab	OB	1,400,000
80.3	Ketua	OB	1,250,000
80.4	Wakil Ketua	OB	1,100,000
80.5	Sekretaris	OB	1,000,000
80.6	Anggota	OB	750,000
81	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN LINGKUP SKPD (RENSTRA, RENJA, LAKIP, DLL)</b>		
81.1	Pengarah	OB	1,500,000
81.2	Penanggungjawab	OB	1,250,000
81.3	Ketua	OB	1,000,000
81.4	Wakil Ketua	OB	900,000
81.5	Sekretaris	OB	750,000
81.6	Anggota	OB	500,000

RAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>82</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL</b>		
82.1	Penanggung Jawab	Oter	450,000
82.2	Redaktur	Oter	350,000
82.3	Penyunting/Editor	Oter	275,000
82.4	Desain Grafis/Fotografer	Oter	180,000
82.5	Sekretariat	Oter	150,000
82.6	Pembuat Artikel	Halaman	150,000
<b>83</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH/SAMBUTAN/PIDATO/ NASKAH</b>		
83.1	Penanggung Jawab	Oter	450,000
83.2	Redaktur	Oter	350,000
83.3	Penyunting/Editor	Oter	300,000
83.4	Desain Grafis/Fotografer	Oter	180,000
83.5	Sekretariat	Oter	180,000
84.6	Pembuat Artikel	Halaman	150,000
83.7	Pembuat Sambutan/Pidato/Naskah	Per Naskah	400,000
<b>84</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA DATA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEHUMASAN</b>		
84.1	Penanggung Jawab	Oter	450,000
84.2	Redaktur	Oter	350,000
84.3	Penyunting/Editor	Oter	300,000
84.4	Teknisi Audio Video	Oter	300,000
84.5	Kameramen	Oter	180,000
84.6	Photografer	Halaman	180,000
<b>85</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
85.1	Penanggung Jawab	Oter	450,000
85.2	Redaktur	Oter	350,000
85.3	Editor	Oter	300,000
85.4	Web. Admin	Oter	250,000
85.5	Web. Developer	Oter	200,000
85.6	Pembuat Artikel	Halaman	50,000
85.7	Penerjemah	1500 Karakter	50,000
<b>86</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF</b>		
86.1	Ketua	OB	350,000
86.2	Sekretaris	OB	250,000
86.3	Anggota	OB	200,000
<b>87</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
87.1	Atasan Langaung Pemegang Kas/PA/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 miliar	OB	350,000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	460,000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	580,000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.200 miliar	OB	690,000
87.2	Pemegang Kas/Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 miliar	OB	250,000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	330,000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	410,000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.200 miliar	OB	490,000
87.3	Juru Bayar/Staf		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 miliar	OB	200,000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	270,000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	340,000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.200 miliar	OB	410,000
<b>88</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VARASI</b>		
88.1	Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
b.	Pengawas Ujian	OH	200,000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	3,000
88.2	Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
b.	Pengawas Ujian	OH	250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	4,500
88.3	Tingkat Perguruan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata Satu (S1)		
	1. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	250,000
	2. Pengawas Ujian	OH	290,000
	3. Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	7,500
	4. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	250,000
	5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Ujian	290,000
	6. Penguji ujian ketrampilan pada ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75,000
	b. Strata 2 (S2)		
	1. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	260,000
	2. Pengawas Ujian	OH	300,000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	15,000
	4. Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	350,000
	c. Strata 3 (S3)		
	1. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	280,000
	2. Pengawas Ujian	OH	300,000
	3. Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	20,000
	4. Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	500,000
89	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENGOLAH BUKU PERPUSTAKAAN</b>		
89.1	Tenaga Klasifikasi Buku	OBk	2,000
89.2	Tenaga Katalogisasi Buku	OBk	2,000
89.3	Tenaga Inventarisasi Buku	OBk	1,500
89.4	Tenaga Entri Katalog Buku	OBk	1,500
89.5	Tenaga Finishing dan Selfing Buku	OBk	1,500
90	<b>HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN</b>		
90.1	Tenaga Pengelola Perpustakaan Negeri	OB	250,000
91	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENGOLAH TERBITAN BERKALA DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA KOLEKSI DAERAH</b>		
91.1	Tenaga Klasifikasi Terbitan Berkala	Oeks	2,000
91.2	Tenaga Katalogisasi Terbitan Berkala	Oeks	2,000
91.3	Tenaga Inventarisasi Terbitan Berkala	Oeks	1,500
91.4	Tenaga Entri Katalog Terbitan Berkala	Oeks	1,500
91.5	Tenaga Fumikasi dan Selfing Koleksi Bahan Pustaka	OK	200,000
92	<b>HONORARIUM PETUGAS LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING (LAYANAN EKSTESI)</b>		
92.1	Petugas Layanan Perpusing (Gol. III)	OJ	17,000
92.2	Petugas Layanan Perpusing (Gol. II)	OJ	15,000
93	<b>HONORARIUM PEMBAHASAN APBD (DPRD)</b>		
93.1	Ketua	OK	3,500,000
93.2	Wakil Ketua	OK	3,000,000
93.3	Sekretaris	OK	2,500,000
93.4	Anggota	OK	2,000,000
94	<b>HONORARIUM PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN (DPRD)</b>		
94.1	Ketua	OK	3,500,000
94.2	Wakil Ketua	OK	3,000,000
94.3	Sekretaris	OK	2,500,000
94.4	Anggota	OK	2,000,000
95	<b>HONORARIUM/INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (APPD)</b>		
95.1	Kepala	OB	2,000,000
95.2	Sekretaris	OB	1,500,000

RHF

KO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	95.3 Kepala Bidang	OB	1,250,000
	95.4 Kepala Sub. Bidang / Kepala Sub. Bagian	OB	1,000,000
	95.5 Staf (PNS/CPNS) Gol. III	OB	750,000
	95.6 Staf (PNS/CPNS) Gol. II	OB	500,000
96	<b>HONORARIUM/INSERTIF TIM PERENCANA DAN TIM DATA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>		
	96.1 Tim Perencana	OB	500,000
	96.2 Tim Data	OB	500,000
97	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAKIP KABUPATEN</b>		
	97.1 Pengarah	OK	5,000,000
	97.2 Penanggung Jawab	OK	4,500,000
	97.3 Ketua	OK	4,000,000
	97.4 Koordinator	OK	3,500,000
	97.5 Anggota	OK	3,000,000
98	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN TAPKIN DAN RKT KABUPATEN</b>		
	98.1 Pengarah	OK	4,000,000
	98.2 Penanggung Jawab	OK	3,750,000
	98.3 Ketua	OK	3,250,000
	98.4 Anggota	OK	2,750,000
99	<b>HONORARIUM TIM POKJA EVALUASI DAK KABUPATEN</b>		
	99.1 Pengarah	OK	7,000,000
	99.2 Penanggung Jawab	OK	6,000,000
	99.3 Ketua Tim Pokja DAK	OK	5,000,000
	99.4 Sekretaris Tim Pokja DAK	OK	4,000,000
	99.5 Anggota Tim Pokja DAK	OK	3,000,000
100	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM POKJA EVALUASI DAK KABUPATEN</b>		
	100.1 Ketua	OK	3,600,000
	100.2 Anggota	OK	3,500,000
101	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN</b>		
	101.1 Penanggung Jawab	OK	3,400,000
	101.2 Ketua	OK	3,000,000
	101.3 Anggota	OK	2,600,000
102	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN</b>		
	102.1 Penanggung Jawab	OK	3,400,000
	102.2 Ketua	OK	3,000,000
	102.3 Anggota	OK	2,600,000
103	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI RKPd KABUPATEN</b>		
	103.1 Penanggung Jawab	OK	3,600,000
	103.2 Ketua	OK	3,400,000
	103.3 Anggota	OK	2,600,000
104	<b>HONORARIUM TIM TEPRA KABUPATEN</b>		
	104.1 Pengarah I	OB	2,000,000
	104.2 Pengarah II	OB	2,000,000
	104.3 Penanggung Jawab I	OB	1,750,000
	104.4 Penanggung Jawab II	OB	1,750,000
	104.5 Penanggung Jawab Harian / Pejabat Penghubung	OB	1,600,000
	104.6 Koordinator/Ketua	OB	1,500,000
	104.7 Anggota	OB	1,250,000
105	<b>HONORARIUM TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		
	105.1 Ketua	OB	1,000,000
	105.2 Wakil Ketua	OB	750,000
	105.3 Sekretaris	OB	500,000
	105.4 Wakil Sekretaris	OB	350,000
	105.5 Anggota	OB	200,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
105.f	Honorarium Sekretariat Tim		
	a. Ketua	OB	250,000
	a. Anggota	OB	200,000
106	<b>HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN OPERASIONAL KOMINDA</b>		
106.1	Ketua	OB	1,200,000
106.2	Ketua Pelaksana Harian	OB	1,070,000
106.3	Sekretaris	OB	1,000,000
106.4	Anggota	OB	750,000
106.5	Honorarium Sekretariat Tim		
	a. Ketua	OB	750,000
	b. Anggota	OB	500,000
107	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</b>		
107.1	Pengarah	OB	2,500,000
107.2	Pembina	OB	2,000,000
107.3	Penanggungjawab	OB	1,500,000
107.4	Ketua	OB	1,250,000
107.5	Sekretaris	OB	1,000,000
107.6	Anggota/Tim Teknis	OB	750,000
108	<b>HONORARIUM TIM OPERASI PENERTIBAN LLASDP DAN LALU LINTAS ANGGKUTAN LAUT</b>		
108.1	Tim Operasi Penertiban LLASDP		
	a. Pengarah	OB	500,000
	b. Penanggungjawab	OB	400,000
	c. Koordinator/Ketua	OB	350,000
	d. Wakil Ketua	OB	300,000
	e. Sekretaris	OB	250,000
	f. Anggota	OB	200,000
108.2	Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut		
	a. Honor Petugas Pol. Air/Syahbandar/KPLP	OH	300,000
109	<b>HONORARIUM DIDANG PERSANDIAN</b>		
109.1	Sandimen	OB	1,700,000
109.2	Operator Transmisi Sandi	OB	1,500,000
109.3	Pembina Pengamanan Persandian	OB	1,500,000
109.4	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	OB	1,300,000
109.5	Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian	OB	1,100,000
109.6	Petugas Kamar Sandi	OB	900,000
109.7	Pendukung Persandian	OB	700,000
110	<b>HONORARIUM PETUGAS PENYIAR RPD, CAMERAMEN, CALLING DAN PELIPUTAN</b>		
110.1	Penyiar RPD	OB	2,000,000
110.2	Cameramen	OB	1,000,000
110.3	Calling	OB	1,000,000
110.4	Peliputan	OB	2,000,000
111	<b>HONORARIUM RAPAT FORUM SKPD</b>		
111.1	Penanggungjawab	OK	500,000
111.2	Koordinator/Ketua	OK	400,000
111.3	Wakil Ketua	OK	350,000
111.4	Sekretaris	OK	300,000
111.5	Anggota	OK	250,000
112	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA GUDANG BUFFER STOCK</b>	OB	750,000
113	<b>HONORARIUM PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PEH)</b>	OB	750,000
114	<b>HONORARIUM PENDAMPING TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN (TKSK)</b>	OB	750,000
115	<b>HONORARIUM PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)</b>	OB	750,000
116	<b>HONORARIUM PENDAMPING ASISTENSI LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)</b>	OB	750,000

211

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
		(3)	(4)
117	HONORARIUM PENDAMPING ORANG DENGAN KECAKATAN BERAT (ODKB)	OB	750,000
118	HONORARIUM PENDAMPING SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL (SAKTI PEKSOS)	OB	750,000
119	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN ASET DAERAH		
	119.1 Ketua	OB	1,200,000
	119.2 Sekretaris	OB	1,100,000
	119.3 Anggota	OB	1,000,000
120	HONORARIUM TIM PENYELARASAN PRODUK HUKUM DAERAH		
	120.1 Ketua	OB	1,500,000
	120.2 Sekretaris	OB	1,300,000
	120.3 Anggota	OB	1,200,000
121	HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH		
	121.1 Pengarah	OB	1,500,000
	121.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
	121.3 Koordinator/Ketua	OB	1,300,000
	121.4 Wakil Ketua	OB	1,200,000
	121.5 Sekretaris	OB	1,000,000
	121.6 Anggota	OB	750,000
122	HONORARIUM FASILITATOR PEMBERDAYAAN KABUPATEN DAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM GSC		
	122.1 Fasilitator Kabupaten	OB	3,000,000
	122.2 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)		
	a. Ketua	OB	2,500,000
	b. Sekretaris	OB	1,800,000
	c. Bendahara I	OB	1,000,000
	d. Bendahara II	OB	1,750,000
123	HONORARIUM TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA KABUPATEN MALUKU TENGAH		
	123.1 Ketua	OB	2,500,000
	123.2 Wakil Ketua	OB	2,000,000
	123.3 Anggota	OB	2,000,000
	123.4 Sekretariat FORKOPIMDA		
	a. Koordinator/Ketua	OB	1,500,000
	b. Anggota	OB	1,300,000
	c. Staf Administrasi	OB	500,000
124	HONORARIUM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	124.1 Penanggung Jawab/Pengarah	OB	2,000,000
	124.2 Ketua	OB	1,500,000
	124.3 Wakil Ketua		
	a. Bidang Kependudukan	OB	1,000,000
	b. Bidang Pencatatan Sipil	OB	1,000,000
	c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi	OB	1,000,000
	d. Sekretaris	OB	750,000
	e. Anggota	OB	500,000
125	HONORARIUM TIM VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS		
	125.1 Penanggung Jawab	OB	350,000
	125.2 Koordinator/Ketua	OB	300,000
	125.3 Sekretaris	OB	250,000
	125.4 Anggota	OB	200,000
126	HONORARIUM PETUGAS PENGOLAH DATA STATISTIK PERTANIAN		
	126.1 Koordinator Statistik Kabupaten	OB	250,000
	126.2 Petugas Statistik Kabupaten	OB	200,000
	126.3 Petugas Statistik Kecamatan (Mantri Tani)	OB	150,000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
127	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS SWAKELOLA DAK PERTANIAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
	127.1 Ketua	OB	400,000
	127.2 Sekretaris	OB	300,000
	127.3 Anggota	OB	200,000
128	<b>HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH</b>		
	128.1 Ketua	OB	750,000
	128.2 Sekretaris	OB	500,000
	128.3 Anggota	OB	400,000
129	<b>HONORARIUM TIM PENILAI KELEMBAGAAN PETANI dan PELAKU PERTANIAN BERPRESTASI</b>		
	129.1 Ketua	OB	750,000
	129.2 Sekretaris	OB	500,000
	129.3 Anggota	OB	400,000
130	<b>HONORARIUM KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN</b>		
	130.1 Pembina	OB	1,500,000
	130.2 Ketua	OB	1,200,000
	130.3 Sekretaris	OB	1,000,000
	130.4 Anggota	OB	1,000,000
131	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA DATA ALSINTAN</b>	OB	200,000
132	<b>HONORARIUM PENYULUH HONORER</b>	OB	1,800,000
133	<b>HONORARIUM PENYULUH THL-TBPP</b>	OB	1,800,000
134	<b>HONORARIUM PENDAMPING SISWA DAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS SD DAN SMP TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>		
	134.1 Tingkat Kabupaten		
	a. Honorarium Pendamping	OK	350,000
	b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	150,000
	134.2 Tingkat Provinsi		
	a. Honorarium Pendamping	OK	550,000
	b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	300,000
	134.3 Tingkat Nasional		
	a. Honorarium Pendamping	OK	750,000
	b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	500,000
135	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA EVENT /LOMBA KEPARIWISATAAN</b>		
	135.1 Panitia Lomba	OK	500,000
	135.2 Yuri	OK	1,000,000
	135.1 MC	OK	500,000
	135.2 Rohaniawan	OK	500,000
	135.3 Tim Medis	OK	500,000
	135.4 Petugas Keamanan	OK	500,000
136	<b>HONORARIUM FASILITATOR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)</b>	OB	2,750,000
137	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH PASKIBRAKA</b>	OJ	50,000
138	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN SOAL TES PASKIBRAKA</b>	OK	500,000
139	<b>HONORARIUM TIM TEPRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)</b>		
	139.1 Koordinator/Ketua	OB	1,500,000
	139.2 Sekretaris	OB	1,250,000
	139.3 Anggota	OB	1,000,000
140	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRASIF</b>		
	140.1 Penanggung Jawab	OK	4,000,000
	140.2 Koordinator/Ketua	OK	3,750,000
	140.3 Sekretaris	OK	3,600,000
	140.4 Anggota	OK	3,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
141	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI HARGA KOMODITI</b>		
	141.1 Penanggung Jawab	OB	750,000
	141.2 Ketua	OB	600,000
	141.3 Sekretaris	OB	500,000
	141.4 Anggota	OB	400,000
142	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)</b>		
	142.1 Pengarah	OB	1,500,000
	141.1 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	141.2 Ketua	OB	1,000,000
	141.3 Sekretaris	OB	750,000
	141.4 Anggota	OB	500,000
143	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TKT. I, TINGKAT II, TINGKAT III DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN III SERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN /ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN / ATAU KATEGORI 2</b>		
	143.1 Honorarium Panitia Penyelenggara		
	a. Penanggungjawab	OK	900,000
	b. Ketua	OK	800,000
	c. Wakil Ketua	OK	800,000
	c. Anggota	OK	600,000
	143.2 Honorarium Tenaga Akademis		
	a. Penceramah		
	1. Staregi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	1,000,000
	2. Muatan Teknis Subtansi Lembaga	OJP	1,000,000
	3. Studi Lapangan (agenda II dan III)	OJP	1,000,000
	b. Pengajar		
	1. Pengampu Materi		
	1.1 Overviuw Kebijakan	OJP	200,000
	1.2 Dinamika kelompok	OJP	200,000
	1.3 Pembentukan sifat dan perilaku disiplin	OJP	200,000
	1.4 Akuntabilitas PNS	OJP	200,000
	1.5 Nasionalisme	OJP	200,000
	1.6 Etika Publik	OJP	200,000
	1.7 Komitmen Mutu	OJP	200,000
	1.8 Anti korupsi	OJP	200,000
	1.9 Manajemen ASN	OJP	200,000
	1.10 Whole Government	OJP	200,000
	1.11 Pelayanan Publik	OJP	200,000
	1.12 Konsepsi Aktualisasi	OJP	200,000
	1.13 Penjelasan Aktualisasi	OJP	200,000
	1.14 Study lapangan	OJP	200,000
	1.15 Reviuw Kebijakan penyelenggaraan Diklat	OJP	200,000
	2. Pembimbing (Coach & Mentor)		
	2.1 Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi		
	- Coach	OJP	200,000
	2.2 Evaluasi Rancangan Aktualisasi		
	- Penguji	OJP	200,000
	- Coach	OJP	200,000
	- Mentor	OJP	200,000
	2.3 Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi		
	- Coach	OJP	200,000
	2.4 Evaluasi Aktualisasi		
	- Penguji	OJP	200,000
	- Coach	OJP	200,000
	- Mentor	OJP	200,000
	2.5 Evaluasi Aktualisasi		
	- Penguji	OJP	200,000
	143.3 Instruktur Senam	OK	300,000
	143.4 Tenaga Kesehatan	OK	300,000
144	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
	144.1 Honorarium Panitia Penerimaan CASN		
	a. Pengarah	OB	500,000
	b. Penanggungjawab	OB	450,000

AKF

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	c. Ketua	OB	400,000
	d. Wakil Ketua	OB	350,000
	e. Sekertaris	OB	300,000
	f. Anggota	OB	250,000
144.2	Honorarium Tim Seleksi Administrasi dan verifikasi		
	a. Kordinator	OB	300,000
	b. Administrator Instansi	OB	1,000,000
	c. Verifikator	OB	750,000
	d. Petugas Administrasi Berkas	OB	300,000
144.3	Honorarium Tim Pelaksana Seleksi		
	a. Kordinator	OB	300,000
	b. Tim Pengawas	OH	100,000
	c. Tim Keamanan	OH	100,000
144.4	Honorarium Tim Pengawasan		
	a. Kordinator	OB	300,000
	b. Anggota	OB	250,000
<b>145</b>	<b>TAMBAHAN PENGASILAH APARATUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
	a. Kepala Bagian	OB	6,500,000
	b. Kepala Sub Bagian	OB	4,500,000
	c. Ketua Pokja	OB	5,750,000
	d. Sekretaris Pokja	OB	5,500,000
	e. Anggota Pokja	OB	5,000,000
	f. Staf Golongan III	OB	2,500,000
	g. Staf Golongan I dan II	OB	2,000,000
<b>146</b>	<b>BATUAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF DOKTER</b>		
146.1	Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil	OB	10,000,000
146.2	Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan	OB	2,700,000
146.3	Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil di Kec. Banda, Kec. Nusalaut, Kec. Telutih, Kec. Serut Timur Kobi dan Kec. Serut Timur Seti	OB	3,300,000
146.4	Dokter Residen Senior Spesialis	OB	7,500,000
146.5	Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap	OB	8,240,000
146.6	Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Kecamatan	OB	2,370,000
146.7	Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Kec. Banda, Kec. Nusalaut, Kec. Telutih, Kec. Serut Timur Kobi dan Kec. Serut Timur Seti	OB	1,780,000
<b>147</b>	<b>BATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN SEKDA, KEPALA SKPD DAN KEPALA BAGIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
147.1	Sekretaris Daerah	OB	12,500,000
147.2	Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas	OB	5,500,000
147.3	Camat/Kepala Bagian Lingkup Setda	OB	3,500,000
<b>148</b>	<b>BATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS RSUD MASOHI</b>		
148.1	Biaya Jaga Dokter Spesialis	OB	750,000
148.2	Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur)	OH	250,000
148.3	Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur)	OH	500,000
148.4	Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OB	200,000
148.5	Biaya Jaga Supervisor	OB	300,000
148.6	Biaya Jasa Penagihan Retribusi Pelayanan	OB	150,000
148.7	Biaya Jasa Radiasi	OB	950,000
<b>149</b>	<b>BATUAN TUNJANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PTSP DAERAH</b>		
149.1	Tunjangan Khusus PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
	a. Kepala Dinas	OB	1,500,000
	b. Sekretaris/Kepala Bidang	OB	1,000,000
	c. Kepala Seksi/Kasubag	OB	750,000
	d. Staf	OB	500,000
149.2	Tunjangan Penghasilan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
	a. Pengarah	OB	2,500,000
	b. Pembina	OB	2,000,000
	c. Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	d. Ketua	OB	1,250,000
	e. Sekretaris	OB	1,000,000
	f. Anggota/Tim Teknis	OB	750,000

RD	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
159	<b>SATUAN TUNJANGAN SUVERVISI DAN MONITORING PENGAWAS PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)</b>		
	150.1 Honorarium/Intensif Pengawas PAUD	OB	300,000
	150.2 Honorarium/Intensif Pamong Belajar PNF	OB	300,000
161	<b>SATUAN TUNJANGAN SUVERVISI DAN MONITORING PENGAWAS SD DAN SMP</b>		
	150.1 Honorarium/Intensif Pengawas SD	OB	350,000
	150.2 Honorarium/Intensif Pengawas SMP	OB	350,000
162	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH HONORER</b>	OB	500,000
163	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH THL-TBPP</b>	OB	500,000
164	<b>SATUAN BIAYA PEMONDOKAN PENYULUH HONORER DAN THL-TBPP</b>	OB	500,000
165	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUH PERTANIAN</b>	OB	1,000,000
166	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL FASILITATOR BANTUAN STIMULANS PERUMAHAN SWADAYA</b>	OB	750,000
167	<b>SATUAN INTENSIF PENGOLAHAN LAHAN</b>	Ha	2,000,000
168	<b>SATUAN INTENSIF PERAWATAN TANAMAN</b>	Ha	1,500,000
169	<b>SATUAN INTENSIF PANEN DAN PASKAH PANEN</b>	Ha	2,000,000
160	<b>SATUAN INTENSIF PERBANYAKAN TANAMAN</b>	OB	1,500,000
161	<b>UPAH PENGISIAN POLIBAG</b>	Polibag	2,000
162	<b>SATUAN UPAH PETUGAS KEBERSIHAN/TPA SAMPAH, PETUGAS TAMAN, SOPIR DAN OPERATOR ALAT BERAT</b>		
	162.1 Petugas Kebersihan/TPA Sampah/TPU	OB	2,000,000
	162.2 Petugas Taman	OB	2,000,000
	162.3 Sopir Mobil Taman	OB	2,200,000
	162.4 Sopir Mobil Kebersihan	OB	2,200,000
	162.5 Operator Alat Berat Persampahan	OB	3,200,000
163	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
	163.1 Golongan I dan II	OH	35,000
	163.2 Golongan III	OH	37,000
	163.3 Golongan IV	OH	40,000
164	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	164.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	13,000
	b. Golongan II	OJ	17,000
	c. Golongan III	OJ	20,000
	d. Golongan IV	OJ	25,000
	164.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	35,000
	b. Golongan III	OH	37,000
	c. Golongan IV	OH	40,000
165	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	Orang/ Kali	100,000
166	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKAS PERKANTORAN YANG SAMA</b>	OH	150,000
167	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN HIMTEK/PELATIHAN, SOSIALISASI DAN LAIN-LAIN</b>	OH	100,000
168	<b>SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGHUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH</b>		
	168.1 Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang	m <sup>3</sup>	100,000
169	<b>SATUAN BIAYA UANG DUKA / MENINGGAL DUNIA</b>	Orang/Duka	5,000,000

KG	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
170	<b>BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH</b>		
	170.1 Bupati		5,000,000
	170.2 Wakil Bupati		5,000,000
	170.3 Ketua DPRD		5,000,000
	170.4 Wakil Ketua DPRD		5,000,000
	170.5 Sekretaris Daerah		4,500,000
	170.6 Eselon II		3,500,000
	170.7 Eselon III/Golongan IV		3,000,000
	170.8 Eselon IV/Golongan III		2,500,000
	170.9 Golongan II/1		2,000,000
171	<b>SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS</b>		
	171.1 Dalam Daerah		
	Kota Masohi, Amahai, Teon Nila Serua, Teluk Elpaputih, Tehoru, Telutih, Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Saparua, Saparua Timur, Nusalaut, P. Haruku, Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti dan Banda		
	a. Bupati	OH	1,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	1,250,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris DAERAH	OH	1,000,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	750,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	450,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	450,000
	g. PNS Gol. II	OH	450,000
	h. PNS Gol. I	OH	450,000
	171.2 Luar Daerah Dalam Provinsi		
	Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Pulau Buru, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya		
	a. Bupati	OH	2,000,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	1,500,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,250,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,000,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	750,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	650,000
	g. PNS Gol. II	OH	650,000
	h. PNS Gol. I	OH	550,000
	171.3 Luar Provinsi		
	1. Wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung)		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
	2. Wilayah Jawa (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur)		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
	3. Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000

80	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
4.	Wilayah Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara).		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
5.	Wilayah Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara).		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
6.	Wilayah Maluku Utara		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
7.	Wilayah Papua dan Papua Barat		
	a. Bupati	OH	2,500,000
	b. Ketua DPRD/Wakil Bupati	OH	2,000,000
	c. Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	OH	1,500,000
	d. Anggota DPRD / Pejabat Eselon. II	OH	1,200,000
	e. Pejabat Eselon III / PNS Gol. IV	OH	1,000,000
	f. Pejabat Eselon IV / PNS Gol. III	OH	750,000
	g. PNS Gol. II	OH	750,000
	h. PNS Gol. I	OH	650,000
172	<b>UANG REPRESENTASI</b>		
172.1	Dalam Daerah		
	a. Bupati	OH	300,000
	b. Wakil Bupati	OH	250,000
	c. Ketua DPRD	OH	250,000
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	200,000
	e. Sekretaris Daerah	OH	200,000
	f. Anggota DPRD	OH	150,000
	g. Eselon II	OH	150,000
172.2	Luar Daerah Dalam Provinsi		
	a. Bupati	OH	350,000
	b. Wakil Bupati	OH	250,000
	c. Ketua DPRD	OH	250,000
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	250,000
	e. Sekretaris Daerah	OH	250,000
	f. Anggota DPRD	OH	200,000
	g. Eselon II	OH	200,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
172.3	Luar Provinsi	OH	350,000
a.	Bupati	OH	250,000
b.	Wakil Bupati	OH	250,000
c.	Ketua DPRD	OH	250,000
d.	Wakil Ketua DPRD	OH	250,000
e.	Sekretaris Daerah	OH	200,000
f.	Anggota DPRD	OH	200,000
g.	Eselon II	OH	200,000

R/f

173 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
<b>AMERIKA UTARA</b>						
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	341	291	241
6	Chilie	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
<b>AMERIKA TENGAH</b>						
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
<b>EROPA BARAT</b>						
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
<b>EROPA UTARA</b>						
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
<b>EROPA SELATAN</b>						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	346	288
<b>EROPA TIMUR</b>						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Hongaria	OH	485	438	390	345
34	Polandia	OH	461	415	360	319

RAH



(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
35	Rumania	OH	416	381	313	277
36	Rusia	OH	556	512	407	406
37	Slovakia	OH	437	394	341	303
38	Ukraina	OH	485	436	375	331
<b>AFRIKA BARAT</b>						
39	Nigeria	OH	361	313	292	291
40	Senegal	OH	384	317	237	231
<b>AFRIKA TIMUR</b>						
41	Ethiopia	OH	358	295	221	193
42	Kenya	OH	384	317	237	225
43	Madagaskar	OH	296	244	182	181
44	Tanzania	OH	350	290	244	218
45	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
46	Mozambique	OH	399	329	265	264
<b>AFRIKA SELATAN</b>						
47	Namibia	OH	405	334	268	233
48	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
<b>AFRIKA UTARA</b>						
49	Aljazair	OH	358	295	221	193
50	Mesir	OH	384	317	237	225
51	Maroko	OH	296	244	182	181
52	Tunisia	OH	350	290	244	218
53	Sudan	OH	328	281	248	247
54	Libia	OH	399	329	265	264
<b>ASIA BARAT</b>						
55	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
56	Bahrain	OH	416	294	228	214
57	Irak	OH	447	325	253	231
58	Yordania	OH	406	292	236	225
59	Kuwait	OH	456	325	296	294
60	Libanon	OH	456	325	207	186
61	Qatar	OH	357	267	215	196
62	Arab Suriah	OH	386	276	200	196
63	Turki	OH	358	257	283	253
64	Pst. Arab Emirat	OH	456	364	302	301
65	Yaman	OH	459	323	197	196
66	Saudi Arabia	OH	353	241	269	251
67	Kesultanan Oman	OH	450	331	247	249
<b>ASIA TIMUR</b>						
68	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	413	292	207	206
69	Hongkong	OH	378	238	287	286
70	Jepang	OH	472	320	262	261

AKH

(dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
71	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
72	Korea Utara	OH	494	321	300	278
<b>ASIA SELATAN</b>						
73	Afganistan	OH	385	226	173	172
74	Bangladesh	OH	339	196	167	166
75	India	OH	422	329	327	325
76	Pakistan	OH	343	203	182	181
77	Srilanka	OH	380	242	209	199
78	Iran	OH	421	312	243	217
<b>ASIA TENGAH</b>						
79	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
80	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
<b>ASIA TENGGARA</b>						
81	Philipina	OH	498	459	365	364
82	Singapura	OH	416	294	228	214
83	Malasia	OH	447	325	253	231
84	Thailand	OH	406	292	236	225
85	Myanmar	OH	456	325	296	294
86	Laos	OH	357	267	207	186
87	Vietnam	OH	386	276	215	196
88	Brunei Darusalam	OH	358	257	200	196
89	Kamboja	OH	456	364	283	253
90	Timor Leste	OH	459	323	302	301
<b>ASIA FASIFIK</b>						
91	Australia	OH	636	585	394	393
92	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
93	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
94	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
95	Fiji	OH	363	329	221	179

RAM

## 174 SATUAN BIAYA PENGINAPAN

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I
174.1	<b>DALAM DAERAH</b>										
1.	KOTA MASOHI	550,000	550,000	550,000	500,000	500,000	355,000	355,000	300,000	300,000	300,000
2.	AMAHAI	500,000	500,000	500,000	355,000	355,000	300,000	300,000	250,000	250,000	250,000
3.	TNS	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
4.	TELUK ELPAPUTIH	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
5.	TEHORU	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
6.	TELUTIH	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
7.	SERAM UTARA BARAT	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
8.	SERAM UTARA	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.	SERAM UTARA TIMUR KOBİ	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
10.	SERAM UTARA TIMUR SETI	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
11.	SAPARUA	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
12.	SAPARUA TIMUR	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
13.	NUSALAUT	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
14.	PULAU HARUKU	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
15.	SALAHUTU	900,000	800,000	800,000	700,000	700,000	600,000	600,000	450,000	350,000	350,000
16.	LEIHITU	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
17.	LEIHITU BARAT	400,000	350,000	350,000	300,000	300,000	275,000	275,000	250,000	250,000	250,000
18.	BANDA	570,000	570,000	570,000	450,000	450,000	400,000	400,000	350,000	300,000	300,000
174.2	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>										
1.	KOTA AMBON	1,500,000	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	750,000	750,000	450,000	400,000	400,000
2.	SERAM BAGIAN BARAT	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
3.	SERAM BAGIAN TIMUR	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I
4.	PULAU BURU	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
5.	BURU SELATAN	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
6.	KOTA TUAL	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
7.	MALUKU TENGGARA	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
8.	MALUKU TENGGARA BARAT	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
9.	KEPULAUAN ARU	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
10.	MALUKU BARAT DAYA	850,000	750,000	750,000	650,000	650,000	550,000	550,000	325,000	300,000	300,000
174.3	<b>LUAR PROVINSI</b>										
1.	ACEH	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
2.	SUMATERA UTARA	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
3.	RIAU	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
4.	KEPULAUAN RIAU	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
5.	JAMBI	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
6.	SUMATERA BARAT	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
7.	SUMATERA SELATAN	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
8.	LAMPUNG	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.	BENGKULU	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
10.	BANGKA BELITUNG	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
11.	BANTEN	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
12.	JAWA BARAT	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
13.	D.K.I. JAKARTA	1,870,000	1,425,000	1,425,000	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	650,000	610,000	550,000
14.	JAWA TENGAH	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000

RAH

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekretaris Daerah	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I
16.	JAWA TIMUR	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
17.	BALI	2,870,000	2,425,000	2,425,000	1,800,000	1,800,000	1,200,000	1,200,000	904,000	854,000	854,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
22.	KALIMANTAN TIMUR	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
23.	KALIMANTAN SELATAN	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
24.	KALIMANTAN UTARA	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
25.	SULAWESI UTARA	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
26.	CORONTALO	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
27.	SULAWESI BARAT	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
28.	SULAWESI SELATAN	1,720,000	1,320,000	1,320,000	1,135,000	1,135,000	925,000	925,000	650,000	610,000	610,000
29.	SULAWESI TENGAH	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
30.	SULAWESI TENGGARA	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
31.	MALUKU UTARA	1,200,000	900,000	900,000	700,000	700,000	500,000	500,000	400,000	400,000	400,000
32.	PAPUA	1,870,000	1,425,000	1,425,000	970,000	970,000	750,000	750,000	500,000	400,000	400,000
33.	PAPUA BARAT	1,870,000	1,425,000	1,425,000	970,000	970,000	750,000	750,000	500,000	400,000	400,000

RS H

KR BUPATI MALUKU TENGAH  
TUABIKAL ABUA  
MALUKU TENGAH

**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Pengelola keuangan/kegiatan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD;
- b. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lain;
- d. PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka honorarium hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium sebagai PA/KPA atau sebagai PPK;
- e. Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Staf Administrasi kegiatan maksimal 3 (tiga) orang;
- f. Honorarium pengelola keuangan dimasukkan pada kegiatan pengembangan dan pengoptimalan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. Honorarium pengelola keuangan/kegiatan dibayar sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 9 (sembilan) bulan dikecualikan untuk Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

**2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui penunjukan langsung /pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

*mtf*

Dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

b. **Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diberikan per paket pekerjaan.

*Catatan :*

Dalam hal Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Anggota Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan dalam jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium kepada Pejabat Pengadaan/Panitia/Jasa dan Anggota Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

3. **Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

4. **Honorarium Tim Pengelola LPSE**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberitugas sebagai pengelola pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

5. **Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/ KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

6. **Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai Staf Pelaksana Teknis Kegiatan.Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan per paket pekerjaan.

RTF

**7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola SAI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit akuntansi masing - masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut :

- a) ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- b) ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, anggota paling banyak 8 (delapan) orang;
- c) ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

**8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah**

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan paling banyak 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

**9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur.

**10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.

**11. Honorarium Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / FGD/Kegiatan Sejenis**

**11.1 Honorarium Narasumber**

Honorarium narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat.

*RAH*



Honorarium narasumber Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat;
- c) apabila menjadi tim/panitia merangkap narasumber maka honorarium diberikan salah satu.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

#### 11.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion* / kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focusgroupdiscussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion* /kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar /rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa pemandu acara dalam hal diperlukan.

#### 12. Honorarium Panitia Seminar /Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/diklat/bimtek sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

- a) untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah peserta;
- b) untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang.

#### 13. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (HONDA)

Honorarium diberikan kepada Pegawai tidak tetap Pemerintah (HONDA) yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

ff

**14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)**

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagipara Pegawai Negeri Sipil sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**15. Honorarium Rohaniawan**

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan doa. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

**16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.**

Honorarium dapat diberikan bagi Tenaga IT, Operator Komputer /Aplikasi, Tenaga Administrasi / Teknis lainnya, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala SKPD tidak diperkenankan untuk menambah atau mengangkat pegawai tidak tetap yang dipekerjakan pada SKPD.

Satuan biaya honorarium Tenaga IT dan Operarator Komputer/Aplikasi Tenaga Administrasi dan Petugas Pemadam Kebakaran diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Honorarium tersebut diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga / diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya. Besaran honorarium tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

**17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan**

**1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) tim pelaksana dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- c) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;

- d) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- e) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari - hari;
- f) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. **Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan Kepala SKPD/PA/KPA. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 12 (dua belas) orang.

18. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan PERDA tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

19. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

20. **Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;

RAH

- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

**21. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah.**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

**22. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

**23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.**

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

**24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

*RS*

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
25. **Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
26. **Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
27. **Honorarium Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
28. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;

RA HF

- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
29. **Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
30. **Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
31. **Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
32. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

AAH

- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**36. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan rekonsiliasi dan pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**37. Honorarium Tim SISMIOP PBB - P2 dan Tenaga Outsourcing Kabupaten Maluku Tengah**

**1. Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2**

Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2N adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim SISMIOP PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**2. Honorarium Tenaga Outsourcing**

Honorarium Tenaga Outsourcing adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai tenaga outsourcing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

*Handwritten signature*

38. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
39. **Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
40. **Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah SIKD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
41. **Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara (TPKDN) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara (TPKDN) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
42. **Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab sebagai Tim BAPERJAKAT berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
43. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
44. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

RAH



45. **Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Masukan Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim teknis penyusunan Standar Biaya Masukan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Masukan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
46. **Honorarium Tim Teknis Penyusun Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
47. **Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengevaluasi Renstra SKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
48. **Honorarium Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
49. **Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pemutahiran data Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
50. **Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
51. **Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD DAN Pemerintah Daerah**  
Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD dan Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

RAA

52. **Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
53. **Honorarium Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
54. **Honorarium Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
55. **Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
56. **Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri**  
Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeri dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
57. **Honorarium Tim Pelaksanaan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)**  
Honorarium Tim pelaksanaan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
58. **Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)**  
Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pendataan terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
59. **Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**  
Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ratf

60. **Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**  
Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
61. **Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran**  
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
62. **Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan**  
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
63. **Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)**  
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
64. **Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan**  
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
65. **Honorarium Tim Pembahasan RKA SKPD**  
Honorarium Tim Pembahasan RKA SKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
66. **Honorarium Tim Sekretariat Program Tabao**  
Honorarium Tim Sekretariat Program Tabao adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Sekretariat Program Tabao berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
67. **Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

RAT

68. **Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)**  
1. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah  
2. Honorarium Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
69. **Honorarium Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)**  
Honorarium Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim/Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
70. **Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**  
Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
71. **Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan**  
Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;  
c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
72. **Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan**  
Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :  
a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;  
b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;  
c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

Raf

- 73. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah**  
Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 74. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan**  
Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun hasil evaluasi jabatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 75. Honorarium Tim Penyusun Tugas Pokok dan Fungsi**  
Honorarium Tim Penyusun Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- 76. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik**  
Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tim evaluasi kinerja pelayanan publik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

RR HF

77. **Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**  
Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

78. **Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**  
Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

79. **Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

80. **Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah**  
Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup daerahlainnya adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup Daerah yang ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

Kegiatan penyusunan dokumen lingkup daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun sebuah dokumen daerah dengan melalui kajian dan analisa yang mendalam dan hasil dari kegiatan ini digunakan oleh daerah.

- 81. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup SKPD**  
Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup SKPD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup SKPD (RENSTRA, RENJA, LAKIP, dll) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 82. Honorarium Tim Penyusun Jurnal**  
Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- 83. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah**  
Honorarium tim penyusun buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin / majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 84. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan**  
Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengelola data dokumentasi dan publikasi kehumasan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- 85. Honorarium Tim Pengelola Website**  
Honorarium Tim Pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website Kabupaten yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Website SKPD yang dikelola oleh masing-masing SKPD.  
Pengelola website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :  
a) Honorarium dapat diberikan selama 12 (duabelas) bulan;  
b) data/berita harus selalu di update;

AT

**86. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif**

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah honorarium diberikan kepada Staf Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif atau orang lain dari unsur organisasi resmi yang berada dalam lingkup Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri atau Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Ketentuan Pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri / Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- b). mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- c). bersifat koordinatif;
- d). bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- e). merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada staf Pemerintah Negeri/Negeri Administratif disamping tugas pokoknya sehari - hari;
- f). dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- g). paling banyak 5 (lima) orang.

**87. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan menyangkut honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satker yang mengelola belanja pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Atasan langsung Pemegang Kas/PA/KPA yang merangkap sebagai PPK hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium sebagai Pemegang Kas /PA/KPA atau honorarium sebagai PPK.
2. Pemegang Kas / Bendahara yang merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas.

**88. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi**

1. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan Biaya Pengawas Ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun bahan ujian, penguji dan pemeriksa bahan ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

RF



2. Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasuk uang transport.

**89. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan**

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengolah buku perpustakaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi buku
- b). tenaga katalogisasi buku
- c). tenaga inventarisasi buku
- d). tenaga entri katalog buku
- e). tenaga finishing dan selfing buku

**90. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan**

Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola perpustakaan negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**91. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah**

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengolah terbitan berkala dan melestarikan pustaka koleksi daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi terbitan berkala
- b). tenaga katalogisasi terbitan berkala
- c). tenaga inventarisasi terbitan berkala
- d). tenaga entri katalog terbitan berkala
- e). tenaga fumikasi dan selfing koleksi bahan pustaka

**92. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstesi)**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai petugas layanan perpustakaan keliling (*layanan ekstesi*) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

RAF

- 93. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD)**  
Honorarium Pembahasan APBD adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 94. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD)**  
Honorarium Pembahasan APBD Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 95. Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD)**  
Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Perencana Pembangunan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 96. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah**  
Honorarium/Insentif Tim Perencana dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Perencana dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 97. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten**  
Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen LAKIP Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
  - honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- 98. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten**  
Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen TAPKIN dan RKT Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

*RAH*

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- e). honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

**99. Honorarium Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten**

Honorarium Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.
- e). Honorarium Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten dibayar pertriwulan dan dapat diberikan selama 4 (empat) triwulan.

**100. Honorarium Tim Sekretariat Pokja Evaluasi DAK Kabupaten**

Honorarium Tim Sekretariat Pokja Evaluasi DAK Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Sekretariat Pokja Evaluasi DAK Kabupaten berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**101. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBD Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Evaluasi APBD Kabupaten berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBD Kabupaten diberikan pertriwulan.

**102. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBN Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBN Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Evaluasi APBN Kabupaten berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi APBN Kabupaten diberikan pertriwulan.

**103. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Evaluasi

RATF

RKPD Kabupaten berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten diberikan pertriwulan.

**104. Honorarium Tim TEPRA Kabupaten**

Honorarium Tim TEPRA Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim TEPRA Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**105. Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial**

Honorarium Tim penanganan konflik sosial adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang diberi tugas untuk menangani persoalan konflik sosial, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**106. Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA**

Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI dan atau Lembaga terkait yang diberi tugas sebagai Tim Koordinasi dan Operasional Kominda berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**107. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**108. Honorarium Tim Operasi Penertiban LLASDP dan Lalu Lintas Angkutan Laut**

Honorarium Tim Operasi Penertiban LLASDP dan Lalu Lintas Angkutan Laut adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan operasi penertiban LLASDP dan LLAL berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**109. Honorarium Bidang Persandian**

Honorarium bidang persandian adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dibidang persandian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

**110. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan Berita berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

*RAF*

**111. Honorarium Rapat Forum SKPD**

Honorarium Rapat Forum SKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai penyelenggara/pelaksana Rapat Forum SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**112. Honorarium Petugas Pengelola Gudang Buffer Stock**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai petugas pengelola gudang buffer stock berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

**113. Honorarium Pendamping Keluarga Harapan (PKH)**

Honorarium pendamping keluarga harapan (PKH) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping keluarga harapan (PKH) berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**114. Honorarium Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)**

Honorarium pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**115. Honorarium Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Honorarium pendamping kelompok usaha bersama (KUBE) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping kelompok usaha bersama (KUBE) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**116. Honorarium Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)**

Honorarium pendamping asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**117. Honorarium Pendamping Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)**

Honorarium pendamping orang dengan kecacatan berat (ODKB) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping orang dengan kecacatan berat (ODKB) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

AAH

**118. Honorarium Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS)**

Honorarium pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosiak (SAKTI PEKSOS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**119. Honorarium Tim Pengelola Aset Daerah**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Aset Daerah pada masing-masing SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**120. Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah**

Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tim penyelarasan produk hukum Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**121. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim teknis penyusunan Standar Biaya Khusus dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**122. Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC.**

Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC adalah Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berdasarkan Keputusan Bupati. Honorarium Fasilitator dan UPK diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

**123. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat FORKOMPIMDA Kabupaten Maluku Tengah**

1. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada Forum Pimpinan Daerah

RAH

Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas dan jabatannya. Honorarium dapat diberikan selama 12 bulan.

2. Honorarium Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**124. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**125. Honorarium Tim Validasi Data PMKS dan PSKS**

Honorarium Tim validasi data PMKS dan PSKS adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Validasi Data PMKS dan PSKS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**126. Honorarium Petugas Pengelola Data Statistik Pertanian**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data statistik pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**127. Honorarium Tim Teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**128. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh**

Honorarium Tim Penilai angka kredit penyuluh adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**129. Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi**

Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

RAH

- 130. Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 131. Honorarium Petugas Pengelola Data ALSINTAN**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data ALSINTAN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 132. Honorarium Penyuluh Honorer**  
Honorarium Penyuluh Honorer adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga penyuluh honorer yang telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 133. Honorarium Penyuluh THL-TBPP**  
Honorarium Penyuluh THL-TBPP adalah honorarium yang diberikan kepada penyuluh tenaga harian lepas atau tenaga bantu penyuluh pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 134. Honorarium Pendamping Siswa dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional**
1. Honorarium Pendamping siswa adalah honorarium yang diberikan kepada guru pendamping siswa SD atau SMP dalam mengikuti lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
  2. Uang saku peserta kegiatan Olimpiade Sains adalah uang saku yang diberikan kepada siswa SD atau SMP yang ditetapkan sebagai peserta lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- 135. Honorarium Panitia Penyelenggara Event/Lomba Bidang Kepariwisata**  
Honorarium Panitia Penyelenggara Even/Lomba Bidang Kepariwisata adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Panitia Penyelenggara Event/Lomba Bidang Kepariwisata berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 136. Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)**  
Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang



diberi tugas sebagai Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**137. Honorarium Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA**

Honorarium dapat diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang ditetapkan sebagai Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**138. Honorarium Tim Penyusunan Soal PASKIBRAKA**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**139. Honorarium Tim TEPPRA Organisasi Perangkat Daerah**

Honorarium Tim TEPPRA Organisasi Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Tim TEPPRA Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**140. Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**141. Honorarium Tim Evaluasi Harga Komoditi**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Harga Komoditi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**142. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**143. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. II dan Gol. III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. I Dan Gol. II dan/atau Gol. III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2.**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. II dan Gol. III Serta

RF

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan Gol. II dan/atau Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 144. Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil**  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 145. Tambahan Penghasilan Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**  
Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan keputusan Bupati.
- 146. Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter**  
Tunjangan /Insentif Kesejahteraan Dokter diperuntukan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap yang bersatus sebagai dokter dan bertugas di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- 147. Satuan Tambahan Penghasilan Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Satuan Tambahan Penghasilan yang diberikan bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala SKPD dan Kepala Bagian adalah tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
- 148. Satuan Tambahan Penghasilan PNS RSUD Masohi**  
Satuan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada RSUD Masohi berdasarkan beban kerja.
- 149. Satuan Tunjangan Khusus Penyelenggara PTSP Daerah**  
Satuan Tunjangan Khusus Penyelenggaraan PTSP Daerah adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai penyelenggara PTSP di Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- 150. Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal**  
Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk melakukan tugas supervisi dan monitoring.

RAF

Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas SD dan SMP untuk melakukan tugas supervisi dan monitoring.

**152. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honoror**

Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honoror adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh Honoror berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

**153. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP**

Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

**154. Satuan Biaya Pemondokan Penyuluh Honoror dan THL-TBPP**

Satuan biaya pemondokan Penyuluh Honoror dan Penyuluh THL-TBPP adalah biaya pemondokan yang diberikan kepada Penyuluh Honoror dan Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**155. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian**

Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian adalah biaya operasional yang diberikan kepada Balai Penyuluh Pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**156. Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)**

Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya adalah biaya operasional yang diberikan kepada Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**157. Satuan Intensif Pengolahan Lahan**

Satuan intensif pengolahan lahan adalah intensif yang diberikan kepada petani yang melakukan pengolahan lahan pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**158. Satuan Intensif Perawatan Tanaman**

Satuan intensif perawatan tanaman adalah intensif yang diberikan kepada petani yang melakukan perawatan tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**159. Satuan Intensif Panen dan Paskah Panen**

Satuan intensif panen dan paskah panen adalah intensif yang diberikan kepada petani yang melakukan panen dan paskah panen berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

RTT

**160. Satuan Intensif Perbanyak Tanaman**

Satuan intensif perbanyak tanaman adalah intensif yang diberikan kepada petani yang melakukan perbanyak tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**161. Upah Pengisian Polibag**

Upah yang diberikan kepada petani yang melakukan pengisian polibag berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**162. Satuan Upah Petugas Kebersihan/TPA Sampah, Petugas Taman, Sopir dan Operator Alat Berat.**

Upah yang diberikan kepada petugas kebersihan/TPA sampah, sopir kebersihan/TPA sampah, sopir taman dan operator alat berat persampahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**163. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara**

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

**164. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**165. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. melibatkan peserta dari masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan

*RAF*

f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (minimal pejabat setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

Satuan biaya uang saku rapat tidak termasuk konsumsi rapat.

**166. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama**

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (*delapan*) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

**167. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi Dan Lain-Lain**

Satuan biaya uang saku kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan lain-lain adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya uang saku peserta kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan kegiatan yang sejenis.

**168. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah**

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

**169. Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia**

Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi.

**170. Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah**

Biaya Pemetician dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi.

**171. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas**

Satuan biaya Uang Harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi. Untuk

RAF

perjalanan dinas PP dalam Kecamatan Kota Masohikurangdari8 (*delapan*) jam hanya diberikan biaya transportasi. Sedangkan untuk perjalanan dinas diatas 8 (*delapan*) jam diberikan biaya transportasi dan uang harian dan disesuaikan dengan waktu penugasan.

**172. Uang Representasi**

Uang Representasi adalah uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

Uang Representasi berlaku juga bagi Pjs/Plt yang menduduki jabatan Eselon II.

**173. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan Biaya Uang Harian perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas luar negeri sudah termasuk biaya penginapan, dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

**174. Satuan Biaya Penginapan**

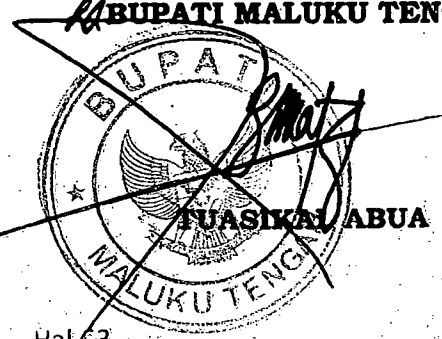
Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

*Catatan :*

1. Bagi Pejabat yang menduduki jabatan eselon III dengan pangkat awal Penata Tk. I atau Gol. III/d, pengalokasian biaya penginapan dibayar berdasarkan eselon yang dijabatnya.
2. Biaya penginapan bagi istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan III non eselon.
3. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

---

**BUPATI MALUKU TENGAH, HA**



Hal. 3

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TANGGAL : 41 AGUSTUS 2018

TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KABUPATEN/DALAM</b>	Orang/Kali	150,000
2	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>		
2.1.	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30,261,000
2.2.	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	23,125,000
2.3.	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	21,230,000
2.4.	Break Trough Laboratorium Kepemimpinan	Orang/Kali	5,000,000
2.5.	Uang Saku Diklat Kepemimpinan (PIM Tk III dan IV)	Orang/Kali	100,000
3	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4,470,000
3.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5,545,000
4	<b>SATUAN BIAYA KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
4.1	Golongan IV	Peserta/Angkatan	5,000,000
4.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5,000,000
4.3	Golongan II	Peserta/Angkatan	5,000,000
4.4	Golongan I	Peserta/Angkatan	5,000,000
5	<b>SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
5.1	Kendaraan Bupati	Unit/Tahun	25,450,000
5.2	Kendaraan Wakil Bupati	Unit/Tahun	22,260,000
5.3	Kendaraan Ketua DPRD	Unit/Tahun	22,260,000
5.4	Kendaraan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	20,350,000
5.5	Kendaraan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	20,350,000
5.6	Kendaraan Staf Ahli	Unit/Tahun	12,720,000
5.7	Kendaraan Assisten Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	12,720,000
5.8	Kendaraan Kepala SKPD/Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	12,720,000
5.9	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	14,740,000
5.10	Kendaraan Operasional Lapangan ( <i>double garden</i> )	Unit/Tahun	16,540,000
5.11	Kendaraan Roda 4 (empat) Patroli Jalan Raya	Unit/Tahun	16,540,000
5.12	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	12,340,000
5.13	Kendaraan Laut ( <i>speed boat</i> )	Unit/Tahun	19,340,000
6	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
6.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70,000
6.2	Meja, Kursi dan Lemari Kantor	Unit/Tahun	100,000
6.3	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630,000
6.4	Printer	Unit/Tahun	600,000
6.5	AC Split	Unit/Tahun	530,000
6.6	Mesin Ketik	Unit/Tahun	500,000
6.7	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6,250,000
6.8	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7,500,000
6.9	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,820,000
6.10	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9,360,000
6.11	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11,520,000
6.12	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12,860,000
6.13	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13,770,000
6.14	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14,580,000
6.15	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15,430,000
6.16	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18,200,000
6.17	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19,940,000
6.18	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22,250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6.19	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27,590,000
<b>7</b>	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR</b>		
7.1	Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	15,300,000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	16,200,000
b.	Uang Buku dan Referensi per tahun		
-	Diploma I	OT	1,250,000
-	Diploma III	OT	1,500,000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	1,750,000
7.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19,700,000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20,300,000
b.	Uang Saku dan Referensi per tahun		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,250,000
<b>8</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>		
8.1	Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit		
a.	Kelas I	OH	32,000
b.	Kelas II	OH	28,000
c.	Kelas III	OH	25,000
d.	VIP	OH	40,000
8.2	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	OH	25,000
<b>9</b>	<b>SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>		
9.1	Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	61,000,000
9.2	Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1,525,000
<b>10</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUMAN</b>		
10.1	Makan dan Minum Rapat		
a.	Makan	Orang/Hari	40,000
b.	Minum	Orang/Hari	15,000
10.2	Makan dan Minum Kegiatan (Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan dll)		
a.	Makan	Orang/Hari	40,000
b.	Minum	Orang/Hari	15,000
10.3	Makan dan Minum Tamu		
a.	Makan	Orang/Hari	40,000
b.	Minum	Orang/Hari	15,000
10.4	Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas		
a.	Makan	Orang/Hari	30,000
b.	Minum	Orang/Hari	10,000
<b>11</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN /ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1,600,000
<b>12</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</b>		
12.1	Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /Tahun	187,000
12.2	Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /Tahun	130,000
12.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /Tahun	13,000
<b>13</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN</b>		
13.1	Ruang Besar 100-300 Peserta	Per hari	5,000,000
13.2	Ruang Sedang 50-100 Peserta	Per hari	1,500,000
13.3	Ruang Kecil 50 Peserta	Per hari	750,000

RAF



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
14	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>		
14.1	Roda Empat	Per hari	800,000
14.2	Roda Enam/Bus Sedang	Per hari	1,500,000
14.3	Roda Enam/Bus Besar	Per hari	2,000,000
15	<b>SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM</b>		
15.1	Sound System Ruangan	Per hari	1,000,000
15.2	Sound System Lapangan Standar	Per KW	1,000
15.3	Sound System Lapangan Lux	Per KW	1,500
16	<b>SATUAN BIAYA SEWA GENERATOR</b>	Per hari	3,000,000
17	<b>SATUAN BIAYA SEWA TENDA</b>		
17.1	Tenda Biasa	Per hari	350,000
17.2	Tenda Lux	Per hari	500,000
18	<b>SATUAN BIAYA SEWA MEUBELER</b>		
18.1	Sewa Kursi	Per hari	7,000
18.2	Sewa Sofa	Per hari	500,000
18.3	Sewa Meja	Per hari	250,000
19	<b>SATUAN BIAYA SEWA DEKORASI</b>		
19.1	Untuk Ruang Besar	Per hari	1,500,000
19.2	Untuk Ruang Kecil	Per hari	750,000
19.3	Untuk Luar Ruangan	Per Kegiatan	2,000,000
20	<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN SPANDUK</b>	Per Meter	60,000
21	<b>SATUAN BIAYA PEMASANGAN SPANDUK</b>	Per Buah	50,000
22	<b>SATUAN BIAYA PEMASANGAN BALEHO</b>	Per Buah	100,000
23	<b>SATUAN BIAYA PELIPUTAN MEDIA ELETRONIK DAN MEDIA CETAK</b>		
23.1	Media Elektronik	Per Berita	1,000,000
23.2	Media Cetak	Per Berita	200,000
24	<b>SATUAN BIAYA MEDIA CETAK DAN MEDIA ONLINE</b>		
24.1	Media Cetak Harian	Eksemplar	7,000
24.2	Media Cetak Mingguan	Eksemplar	15,000
24.3	Media Cetak Bulanan	Eksemplar	60,000
24.4	Media Online	Bulan	1,000,000
25	<b>SATUAN BIAYA DOKUMENTASI KEGIATAN</b>	Per Paket/Kegiatan	300,000
26	<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN LAPORAN</b>		
26.1	Laporan Akhir/Laporan Tahunan	Buku	150,000
26.2	Laporan Triwulan	Buku	130,000
26.3	Laporan Bulanan	Buku	100,000
27	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>		
27.1	Pakaian Dinas Harian Lengkap	Stel	600,000
27.2	Pakaian Dinas Satpol PP Lengkap	Stel	900,000
27.3	Pakaian Hansip Lengkap	Stel	600,000
27.4	Pakaian Sipil Harian	Stel	900,000
27.5	Pakaian Sipil Resmi	Stel	1,200,000
27.6	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	2,500,000
27.7	Pakaian Korpri	Stel	500,000
27.8	Pakaian Olah Raga	Stel	300,000
27.9	Pakaian Daerah	Stel	500,000
27.10	Pakaian Kerja Lapangan	Stel	900,000

RAT

URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(2)	(3)	(4)
<b>SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>		
28.1 Pejabat Eselon II		
a. Halfday	Orang/Kali	250.000
b. Fullday	Orang/Kali	340.000
c. Fullboard	Orang/Kali	815.000
28.2 Pejabat Eselon III kebawah		
a. Halfday	Orang/Kali	150.000
b. Fullday	Orang/Kali	288.000
c. Fullboard	Orang/Kali	563.000
<b>SATUAN BIAYA KONTRIBUSI FASILITASI PERDA DAN PERBUP</b>		
29.1 Biaya Kontribusi Fasilitasi Perda	Per Perda	5.000.000
29.2 Biaya Kontribusi Fasilitasi Perbup	Per Perbup	5.000.000
<b>SATUAN BIAYA COPY, JILID DAN CETAK</b>		
30.1 Biaya Copy Hitam Putih		
a. HVS A4	Lembar	450
b. HVS F4	Lembar	450
c. HVS A3	Lembar	800
d. HVS warna	Lembar	500
e. Buffalo	Lembar	1.700
30.2 Biaya Copy Warna		
a. HVS A4	Lembar	7.000
b. HVS F4	Lembar	7.000
c. HVS A3 (copy print)	Lembar	12.000
d. HVS A4 (copy print)	Lembar	7.000
e. HVS F4 (copy print)	Lembar	7.000
30.3 Biaya Jilid Dokumen		
a. Jilid Biasa (Tipis)	Lembar	7.000
b. Jilid Biasa (Tebal)	Lembar	52.000
c. Jilid Cover	Lembar	52.000
d. Jilid Spiral	Lembar	17.000
e. Jilid Stiker	Lembar	37.000
30.3 Biaya Cetak Cover Dokumen		
a. Cetak Kop Sampul Dokumen	Lembar	25.000
<b>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENDAMPING DAN SISWA KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE SAINS SD DAN SMP TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>		
31.1 Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
a. Kecamatan Kota Masohi	OT	110.000
b. Kecamatan Amahai	OT	110.000
c. Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165.000
d. Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110.000
e. Kecamatan Seram Utara	OT	550.000
f. Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550.000
g. Kecamatan Tehoru	OT	330.000
h. Kecamatan Banda	OT	1.430.000
i. Kecamatan Saparua	OT	550.000
j. Kecamatan Saparua Timur	OT	550.000
k. Kecamatan Nusalaut	OT	550.000
l. Kecamatan P. Haruku	OT	550.000
m. Kecamatan Salahutu	OT	605.000
n. Kecamatan Leihitu	OT	825.000
o. Kecamatan Leihitu Barat	OT	825.000
p. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605.000
q. Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660.000
r. Kecamatan Telutih	OT	550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	(2)	(3)	(4)
31.2	Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Provinsi	OT	825.000
31.3	Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Nasional	OT	6.150.000
	Transportasi Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
a.	Kecamatan Kota Masohi	OT	110.000
b.	Kecamatan Amahai	OT	110.000
c.	Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165.000
d.	Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110.000
e.	Kecamatan Seram Utara	OT	550.000
f.	Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550.000
g.	Kecamatan Tehoru	OT	330.000
h.	Kecamatan Banda	OT	1.430.000
i.	Kecamatan Saparua	OT	550.000
j.	Kecamatan Saparua Timur	OT	550.000
k.	Kecamatan Nusalaut	OT	550.000
l.	Kecamatan P. Haruku	OT	550.000
m.	Kecamatan Salahutu	OT	605.000
n.	Kecamatan Leihitu	OT	825.000
o.	Kecamatan Leihitu Barat	OT	825.000
p.	Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605.000
q.	Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660.000
r.	Kecamatan Telutih	OT	550.000
31.5	Transportasi Siswa Tingkat Provinsi	OT	825.000
31.6	Transportasi Siswa Tingkat Nasional	OT	6.150.000
<b>32</b>	<b>SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS</b>		
32.1	ACEH	Orang/Kali	95.000
32.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
32.3	RI A U	Orang/Kali	70.000
32.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	96.000
32.5	J A M B I	Orang/Kali	60.000
32.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	151.000
32.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	90.000
32.8	LAMPUNG	Orang/Kali	123.000
32.9	BENGKULU	Orang/Kali	80.000
32.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	60.000
32.11	B A N T E N	Orang/Kali	306.000
32.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	60.000
32.13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	213.000
32.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
32.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94.000
32.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
32.17	B A L I	Orang/Kali	116.000
32.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
32.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	72.000
32.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107.000
32.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	80.000
32.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	97.000
32.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	353.000
32.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
32.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110.000
32.26	GORONTALO	Orang/Kali	115.000
32.27	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
32.28	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
32.29	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	60.000
32.30	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131.000
32.31	MALUKU	Orang/Kali	250.000
32.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174.000
32.33	PAPUA	Orang/Kali	354.000
32.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

31 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
PERGI-PULANG (PP)

(dalam US\$)

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Washington DC	12,733	6,891	3,662
2	Otawa	12,266	6,924	4,083
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3	Buenos Aries	23,000	15,300	10,400
4	Caracas	23,128	13,837	6,825
5	Brasilia	16,393	11,518	5,970
6	Santiago	21,874	15,539	8,900
7	Bogota	18,399	9,426	7,713
8	Lima	8,263	8,263	5,038
9	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
10	Quito	17,325	16,269	12,127
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11	Mexico City	11,822	7,831	3,966
12	Havana	14,702	11,223	7,335
13	Panama	15,532	9,306	6,195
<b>EROPA BARAT</b>				
14	Wina	10,500	4,177	3,367
15	Brussels	10,713	5,994	3,870
16	Paris	10,724	6,085	3,331
17	Berlin	10,277	6,126	3,959
18	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
19	Bern	11,478	6,778	4,355
<b>EROPA UTARA</b>				
20	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
21	Helsinki	10,023	5,931	3,681
22	Oslo	9,856	4,773	4,049
23	Stockholm	9,917	5,506	3,433
24	London	11,410	7,293	4,153
<b>EROPA SELATAN</b>				
25	Sarayevo	11,778	7,129	6,033
26	Zagreb	16,974	10,177	5,182
27	Madrid	10,393	4,767	3,631
28	Athens	14,911	9,256	8,041
29	Roma	10,000	6,000	4,500
30	Lisabon	9,309	4,746	3,383
31	Beograd	10,318	6,404	5,564

RAH

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>EROPA TIMUR</b>			
32	Sofia	7,473	6,346	3,612
33	Praha	19,318	11,848	6,748
34	Budapest	8,839	5,979	2,187
35	Warsawa	10,777	5,052	3,447
36	Bukarest	8,839	4,982	4,113
37	Moskow	9,537	7,206	5,143
38	Klev	10,860	6,029	5,193
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
39	Abuja	10,281	7,848	6,818
40	Dakar	12,900	9,848	8,555
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
41	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
42	Nairobi	8,732	7,966	6,081
43	Antananarive	11,779	9,000	8,282
44	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
45	Harare	11,118	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
47	Windhoek	18,241	11,774	7,510
48	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
49	Algires	9,536	6,593	5,710
50	Kairo	8,683	7,122	4,483
51	Rabat	8,910	7,721	5,665
52	Tunis	9,419	5,018	3,619
53	Khartoum	5,904	4,507	3,915
54	Tripoli	6,551	5,706	4,975
	<b>ASIA BARAT</b>			
55	Damascus	8,684	5,390	3,325
56	Manawa	6,573	6,154	4,827
57	Bagdad	5,433	4,148	3,545
58	Amman	7,561	6,431	3,545
59	Kuwait City	6,771	4,273	3,110
60	Beirut	7,703	4,490	3,730
61	Doha	5,216	3,639	2,745
62	Riyadah	5,359	3,510	3,000
63	Ankara	9,449	6,643	3,581
64	Abudhabi	5,283	4,976	2,727
65	Sanaa	8,205	5,878	3,679
66	Istanbul	11,061	4,435	2,467
67	Muskat	6,469	5,156	3,727

RTG

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASIA TIMUR</b>			
68	Beijing	2,595	2,140	1,623
69	Hongkong	3,028	2,633	1,257
70	Tokyo	3,734	2,675	1,835
71	Seul	3,233	2,966	1,737
72	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
	<b>ASIA SELATAN</b>			
73	Kabul	6,307	3,905	3,028
74	Dhaka	3,063	2,417	1,092
75	New Delhi	3,500	2,500	1,500
76	Islamabad	5,482	3,333	2,501
77	Kolombo	3,119	2,562	2,628
78	Teheran	5,800	4,600	3,200
	<b>ASIA TENGAH</b>			
79	Tashken	13,617	8,453	7,343
80	Astana	13,661	12,089	8,962
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
81	Manila	2,453	1,614	1,150
82	Singapura	991	673	403
83	Kualalumpur	1,158	659	585
84	Bangkok	2,344	1,155	823
85	Johor Bahru	1,195	911	525
86	Laos	2,274	2,025	1,420
87	Hanoi	1,833	1,833	1,656
88	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
89	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
90	Dilli	747	491	350
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
91	Canberra	6,304	6,304	2,500
92	Wellington	11,750	9,830	4,120
93	Port Moresbi	17,090	13,835	8,252
94	Suva	12,668	4,461	2,669
95	Darwin	6,689	4,900	3,964

RAT

32 SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS PERGI - PULANG (PP) DARI KOTA MASOHI

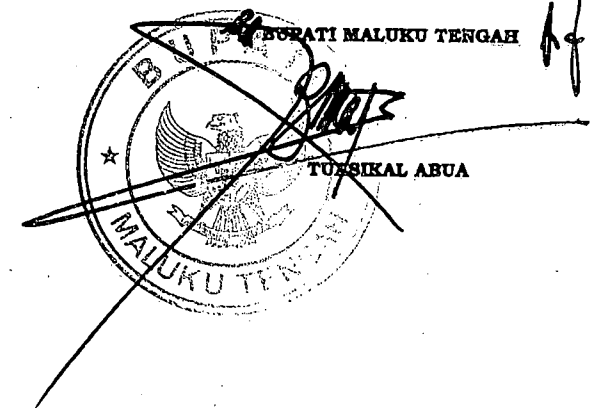
(dalam rupiah)

NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORT									
		BUPATI	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/ GOL. III	GOL. I DAN II
<b>32.1</b>	<b>DALAM DAERAH</b>										
1	KOTA MASOHI	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
2	AMAHAI	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
3	TNS	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
4	TELUK ELPAPUTIH	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
5	TEHORU	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
6	TELUTHI	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
7	SERAM UTARA BARAT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
8	SERAM UTARA	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9	SERAM UTARA TIMUR KOBI	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000
10	SERAM UTARA TIMUR SETI	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
11	SAPARUA	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
12	SAPARUA TIMUR	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
13	NUSALAUT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
14	PULAU HARUKU	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
15	SALAHUTU	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	605,000	605,000
16	LEIHITU	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000	825,000
17	LEIHITU BARAT	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000	825,000
18	BANDA	1,870,000	1,870,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,430,000	1,430,000
<b>32.2</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>										
1	KOTA AMBON	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	825,000	825,000
2	SERAM BAGIAN BARAT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
3	SERAM BAGIAN TIMUR	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
4	PULAU BURU	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
5	BURU SELATAN	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
6	KOTA TUAL	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
7	MALUKU TENGGARA	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
8	MALUKU TENGGARA BARAT	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000
9	KEPULAUAN ARU	5,500,000	5,500,000	5,500,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000
10	MALUKU BARAT DAYA	5,390,000	5,390,000	5,390,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000
<b>32.3</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>										
1	ACEH	13,624,000	14,242,000	11,424,000	10,324,000	10,324,000	9,636,000	9,636,000	9,306,000	9,306,000	9,306,000
2	SUMATERA UTARA	13,404,000	11,204,000	11,204,000	10,104,000	10,104,000	9,300,000	9,300,000	8,970,000	8,970,000	8,970,000
3	RIAU	13,376,000	11,176,000	11,176,000	10,076,000	10,076,000	9,289,000	9,289,000	8,877,000	8,877,000	8,877,000

RAH

	TUJUAN	BUPATI	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL. I DAN II
4	KEPULAUAN RIAU	13,239,000	11,039,000	11,039,000	9,939,000	9,939,000	9,114,000	9,114,000	8,756,000	8,756,000	8,756,000
5	JAMBI	13,101,000	10,901,000	10,901,000	9,801,000	9,801,000	8,976,000	8,976,000	8,619,000	8,619,000	8,619,000
6	SUMATERA BARAT	12,964,000	10,764,000	10,764,000	9,664,000	9,664,000	8,839,000	8,839,000	8,591,000	8,591,000	8,591,000
7	SUMATERA SELATAN	12,551,000	10,351,000	10,351,000	9,251,000	9,251,000	8,564,000	8,564,000	8,206,000	8,206,000	8,206,000
8	LAMPUNG	12,516,000	10,050,000	10,050,000	8,916,000	8,916,000	8,239,000	8,239,000	7,882,000	7,882,000	7,882,000
9	BENGKULU	12,414,000	10,214,000	10,214,000	9,114,000	9,114,000	8,316,000	8,316,000	7,959,000	7,959,000	7,959,000
10	BANOKA BELITUNG	13,294,000	11,094,000	11,094,000	9,994,000	9,994,000	9,086,000	9,086,000	8,729,000	8,729,000	8,729,000
11	BANTEN	11,891,000	9,691,000	9,691,000	8,591,000	8,591,000	8,135,000	8,135,000	7,788,000	7,788,000	7,788,000
12	JAWA BARAT	12,524,000	10,324,000	10,324,000	9,086,000	9,086,000	8,509,000	8,509,000	7,722,000	7,722,000	7,722,000
13	D.K.I. JAKARTA	11,314,000	8,890,000	8,890,000	7,790,000	7,790,000	6,914,000	6,914,000	6,914,000	6,914,000	6,914,000
14	JAWA TENGAH	12,524,000	10,324,000	10,324,000	9,224,000	9,224,000	8,646,000	8,646,000	7,849,000	7,849,000	7,849,000
15	D.I. YOGYAKARTA	12,964,000	10,764,000	10,764,000	9,664,000	9,664,000	9,086,000	9,086,000	8,289,000	8,289,000	8,289,000
16	JAWA TIMUR	9,684,000	7,484,000	7,484,000	7,484,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000
17	BALI	9,960,000	7,760,000	7,760,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000	6,759,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	10,234,000	8,034,000	8,034,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000	6,934,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	10,729,000	8,529,000	8,529,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000	7,429,000
20	KALIMANTAN BARAT	10,894,000	8,694,000	8,694,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000	7,594,000
21	KALIMANTAN TENGAH	11,005,000	8,804,000	8,804,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000
22	KALIMANTAN TIMUR	9,045,000	6,845,000	6,845,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000	5,745,000
23	KALIMANTAN SELATAN	11,005,000	8,804,000	8,804,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000	7,704,000
24	KALIMANTAN UTARA	11,280,000	9,080,000	9,080,000	7,980,000	7,980,000	7,980,000	7,980,000	7,980,000	7,980,000	7,980,000
25	SULAWESI UTARA	9,925,000	7,725,000	7,725,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000	6,927,000
26	GORONTALO	9,650,000	7,450,000	7,450,000	6,735,000	6,735,000	6,020,000	6,020,000	5,305,000	5,305,000	5,305,000
27	SULAWESI BARAT	9,100,000	6,890,000	6,890,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000
28	SULAWESI SELATAN	7,725,000	5,525,000	5,525,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000
29	SULAWESI TENGAH	9,375,000	7,175,000	7,175,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000	6,487,000
30	SULAWESI TENGGARA	9,760,000	7,560,000	7,560,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000
31	MALUKU UTARA	4,425,000	3,325,000	3,325,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000
32	PAPUA	11,575,000	9,925,000	9,925,000	8,825,000	8,825,000	8,825,000	8,825,000	8,825,000	8,825,000	8,825,000
33	PAPUA BARAT	11,300,000	9,650,000	9,650,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000

18/11





**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

- 1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota**  
Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.  
Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.  
Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- 2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**  
Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**  
Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**  
Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bagi pejabat/pegawai negeri / pegawai tidak tetap yang akan mengikuti bimbingan teknis, dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur. Bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankan menggunakan biaya ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.

RAH

5. **Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor**  
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.  
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya bahan bakar minyak.
  
6. **Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**  
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
  
7. **Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non - Gelar**  
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau strata I (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku.
  
8. **Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**  
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit dan penyandang masalah sosial (PMKS).
  
9. **Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran**  
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal.
  
10. **Satuan Biaya Makan dan Minum**  
Satuan biaya makan dan minum adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minuman dan kudapan dan diberikan untuk :

RH

- a. Makan dan Minum Rapat  
Satuan biaya makan dan minum rapat adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman Rapat/Pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor. Rapat koordinasi tingkat eselon II/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah eselon II/pejabat yang setara.
- b. Makan dan Minum Kegiatan  
Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, Diklat, dll.
- c. Makan dan Minum Tamu  
Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk tamu.
- d. Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas  
Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk penjagaan Kantor atau Rumah Dinas.

**11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru**

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

**12. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan**

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

**13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system* dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

RAH

14. **Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota**  
Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukan bagi pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dalam kota dan diberikan secara *at cost*.
15. **Satuan Biaya Sewa Sound Sistem**  
Satuan biaya sewa sound sistem merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa sound sistem yang terdiri dari sound system ruangan, sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis. Untuk sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux dihitung per watt.
16. **Satuan Biaya Sewa Generator**  
Satuan biaya sewa generator merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa generator untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk bahan bakar minyak.
17. **Satuan Biaya Sewa Tenda**  
Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.
18. **Satuan Biaya Sewa Meubeler**  
Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.
19. **Satuan Biaya Sewa Dekorasi**  
Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain sejenis.

RAT

20. **Satuan Biaya Pembuatan Spanduk**  
Satuan biaya pembuatan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembuatan spanduk dihitung dalam satuan meter.
21. **Satuan Biaya Pemasangan Spanduk**  
Satuan biaya pemasangan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemasangan spanduk dan dihitung dalam satuan buah.
22. **Satuan Biaya Pemasangan Baleho**  
Satuan biaya pemasangan baleho digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemasangan baleho dan dihitung dalam satuan buah. Biaya pemasangan baleho belum termasuk biaya sewa Billboard/papan reklame.
23. **Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak**  
Satuan biaya sewa peliputan media eletronik dan media cetak merupakan perencanaan kebutuhan biaya sewa peliputan media elektronik misalnya radio dan televisi sedangkan media cetak misalnya surat kabar/harian/tabloid/bulletin.
24. **Satuan Biaya Media Cetak dan Media Online**  
Satuan biaya media cetak dan media online merupakan perencanaan kebutuhan biaya sewa media cetak harian, mingguan, bulanan seperti surat kabar / harian/ tabloid / bulletin dan satuan biaya sewa media online.
25. **Satuan Biaya Dokumentasi**  
Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan dan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto / gambar, belum termasuk biaya bingkai foto.
26. **Satuan Biaya Pembuatan Laporan**  
Satuan biaya pembuatan laporan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembuatan laporan suatu kegiatan dalam bentuk buku / dokumen yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir kegiatan atau naskah akhir.

*RTA*

**27. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan Biaya Pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

- a. **Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian Lengkap**  
Satuan biaya pakaian dinas harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- b. **Satuan Biaya Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Lengkap**  
Satuan biaya pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security* dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- c. **Satuan Biaya Pakaian Hansip Lengkap**  
Satuan biaya pakaian hansip harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- d. **Satuan Biaya Pakaian Sipil Harian**  
Satuan biaya pakaian sipil harian diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- e. **Satuan Biaya Pakaian Sipil Resmi**  
Satuan biaya pakaian sipil resmi diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- f. **Satuan Biaya Pakaian Sipil Lengkap**  
Satuan biaya pakaian sipil lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- g. **Satuan Biaya Pakaian Korpri**  
Satuan biaya pakaian korpri diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- h. **Satuan Biaya Pakaian Olah Raga**  
Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- i. **Satuan Biaya Pakaian Daerah**  
Satuan biaya pakaian Daerah diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

*RAF*

**28. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kota menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang menghadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II.
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang menghadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, alat tulis, air mineral dan permen*).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, alat tulis dan permen*)

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruangan pertemuan (termasuk *screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, microphone, alat tulis, air mineral dan permen*)

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.

RAF

- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :  
Pejabat eselon II = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang  
Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota.
- 1) Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* diluar kota (lampiran II Nomor 25)
  - 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Nomor 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

**29. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP**

Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP adalah Satuan Biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya kontribusi dalam proses fasilitas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Pemerintah Provinsi Maluku.

**30. Satuan Biaya Copy, Jilid dan Cetak**

Satuan biaya copy, jilid dan cetak adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya copy, jilid dan cetak dokumen.

**31. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional**

Satuan biaya transportasi pendamping dan siswa kegiatan lomba olimpiade sains SD dan SMP tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pendamping dan siswa dalam mengikuti lomba olimpiade sains SD dan SMP untuk tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

MP



**32. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor /tempat kedudukan menuju bandara /pelabuhan/terminal atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Kabupaten Maluku Tengah di hitung dari Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua sampai dengan Bandara Pattimura Laha.
- b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi  
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Masohi ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

- 1) Berangkat :
  - a) Biaya taksi dari pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua ke Bandara Pattimura Laha; dan
  - b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
- 2) Kembali :
  - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
  - b) Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua.

**33. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi - Pulang (PP)**

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan keluar negeri.

**34. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi - Pulang (PP) dari Kota Masohi**

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada pejabat Negara/pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi.

Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin. Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

*AA*

Catatan :

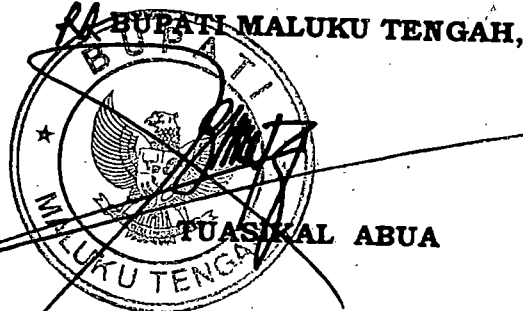
- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten yang tidak mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yang ditetapkan dan diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- c. Biaya transportasi perjalanan dinas untuk istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan pegawai golongan III non eselon.

**Catatan umum :**

- 1) OPD dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
  - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
  - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;
  - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional.
- 2) Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

**Pengertian istilah :**

- |    |      |   |                   |
|----|------|---|-------------------|
| a. | OJ   | : | Orang / Jam       |
| b. | OH   | : | Orang / Hari      |
| c. | OB   | : | Orang / Bulan     |
| d. | OT   | : | Orang / Transport |
| e. | OP   | : | Orang / Paket     |
| f. | OK   | : | Orang / Kegiatan  |
| g. | OR   | : | Orang / Responden |
| h. | Oter | : | Orang / Terbitan  |
| i. | Obk  | : | Orang / Buku      |
| j. | Oeks | : | Orang / Eksemplar |





**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**Jl. Geser No 04. Tlp ( 0914 ) 21024 Fax .217066**

**KodePos 97511 - Masohi**